

BUKU
SAKU PMII

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
RAYON SYARIAH CABANG
PEKALONGAN



*Sekretariat: Dusun Ketitang I RT.02 RW.01 No.
10 Desa Ketitang Kidul, Kab. Pekalongan*

BUKU “**SAKU PMII**”

copyright[©] PMII Rayon Syariah Pekalongan
Diterbitkan oleh PMII Rayon Syariah Pekalongan
2023

Dusun Ketitang I RT.02 RW.01 No. 10 Desa
Ketitang Kidul, Kab. Pekalongan

*Penyusun, Penyunting, Penata letak, Desain
sampul: Ahmad Nur Khozin, PR PMII Syariah*

Cetakan ke- I : Juli 2023

Dicetak Oleh:

*“Dilarang mengutip, memperbanyak, dan
menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa
izin tertulis penerbit”.*

All rights reserved

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

KATA PENGANTAR PENULIS

Salam Pergerakan...!!!

Puji syukur senantiasa kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana berkat limpahan nikmat karunia dan rezekinya selesailah penyusunan Buku Saku PMII Rayon Syariah ini dengan tanpa halangan apapun. Tak lupa juga teman-teman seperjuangan rayon Syariah yang selama ini sudah membersamai proses penulisan hingga rampung.

Buku Saku PMII ini merupakan suatu hal baru yang kami buat dalam lingkup Rayon Syariah. Buku ini terdiri dari beberapa materi ideologis PMII yang dirasa sangat penting untuk dipelajari dan dimengerti bagi anggota dan kader PMII khususnya.

Buku ini disusun dengan mempertimbangkan hal-hal ideologis organisasi PMII yang dibuat dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami bagi pembaca. Dari berbagai literatur bacaan yang tersebar di beberapa media cetak dan elektronik terkumpul dan teringkas dalam Buku Saku ini.

Akhir kata, harapan dari penulis sendiri adalah hidupnya kembali budaya literasi bacatulis yang harus menjadi kultur bagi PMII. Oleh

karenanya, kritik dan saran sangat kami perlukan guna pengembangan Buku Saku PMII. Harapannya Buku Saku PMII ini dapat terus diperbarui dan dapat bermanfaat bagi anggota dan kader PMII Pekalongan khususnya di rayon Syariah Komisariat Ki Ageng Ganjur Pekalongan. Dan ini merupakan contoh hal kecil guna pengembangan budaya intelektual dan budaya literasi yang harus dirawat oleh kader-kader PMII.

Salam Pergerakan....!!!

Pekalongan 2023

Ahmad Nur Khozin

KATA PENGANTAR

(KETUA PC PMII PEKALONGAN)

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia lahir dengan penuh dinamika yang terjadi pada waktu itu, mulai dari melawan rezim yang otoriter, membentuk pemimpin-pemimpin bangsa yang penuh dengan ide dan inovasi serta yang tidak kalah penting adalah PMII dibentuk untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia dan Islam *Ahlusunah Wal Jama'ah An-Nahdliyah*. Ketum PBNU pada saat itu beliau KH. Idham Cholid berpesan amalkan ilmunya kepada masyarakat bukan ilmu untuk ilmu melainkan ilmu untuk di amalkan pada masyarakat. Atas spirit itu PMII dari tahun ke tahun bergerak atas kepentingan masyarakat bukan golongan ataupun pribadi. Karena kepentingan masyarakat secara umum harus didahulukan dari pada kepentingan golongan ataupun pribadi.

Ketika menganalogikan PMII sebagai manusia yang memiliki pikiran, hati atau rasa dan tindakan. Hadirnya Trilogi PMII menjadi

landasan dalam kita berpegang teguh terhadap nilai-nilai yang terkandung. Dzikir, Taqwa dan Kejujuran menjadi kesadaran bersama untuk terus menjadi hamba yang patuh terhadap perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya yang kemudian dzikir menjadi pengingat kita kepada sang Kholiq agar iman kita semakin kuat untuk selalu jujur dalam merasakan semua hal yang terjadi. Fikir, Intelektual dan Kebenaran menjadi pedoman kita agar selalu berfikir dalam melihat segala peristiwa dan menyikapinya dengan kritis, dalam sejarah munculnya istilah intelektual pertama kali di Prancis dimana orang-orang berpendidikan yang memiliki sikap melawan pemerintahan dzholim dengan menggunakan ide gagasan yang mengarah pada kemaslahatan masyarakat secara luas, membela kaum yang tertindas dan memiliki integritas yang tinggi untuk mencapai sebuah kebenaran. Karena output kebenaran adalah kebermanfaatannya kepada orang lain atau masyarakat umum. Amal sholeh, profesional dan keadilan menjadi *final attack* dalam mengimplementasikannya. Dari pondasi yang sudah ada amal sholeh menjadi bagian

terpenting dalam mewujudkannya, karena apabila tidak semua yang telah terbangun hanya akan menjadi omong kosong. Perilaku profesional menjadi sikap kita dalam beradaptasi dimanapun berada dengan tetap memegang teguh nilai-nilai PMII yang kemudian mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan menurut Pramodya Ananta Toer, kita dituntut adil sejak dalam pikiran yang harapannya dalam praktik pun sama, yaitu nilai keadilan yang tetap menjadi prioritas.

Merefleksikan PMII sekarang dalam pengkaderannya perlu adanya pemfokusan minat bakat disetiap bidang profesi untuk mewedahi anggota kader yang tidak mungkin semuanya memiliki kesamaan. Perlu adanya kelas-kelas sesuai minat bakatnya. Seperti kelas puisi, teater, orasi, filsafat, bahasa, riset dan minat bakat lainnya. Pemfokusan itu perlu dirawat agar kader ketika sudah di komisariat ataupun cabang memiliki keahlian yang kuat untuk kemudian menjadi mentor di kepengurusan bawahnya.

Tulisan yang terkumpul dalam buku ini memuat *sosio historis* lahirnya PMII, nilai-nilai PMII dan pendalaman materi pengkaderan formal untuk para anggota agar selalu ingat dan melaksanakan ilmu yang diperolehnya. Buku yang ada ditangan pembaca ini adalah monumen intelektual yang sangat berharga bagi pendalaman materi anggota atau kader untuk lebih jauh mengenal PMII. Khususnya bagi anggota atau kader intelektual organik, kader yang lahir dari dinamika problematika masyarakat yang kemudian berusaha menciptakan solusi bagi masyarakat.

Pekalongan 2023

Akhmad Arfani

KATA PENGANTAR
(KETUA PK PMII KI AGENG GANJUR UIN
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN)

Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunianya kita masih mampu berdzikir kepada-Nya dan berfikir untuk-Nya. Salam hormat dari saya kepada seluruh kader dan anggota PMII Pekalongan, khususnya di bawah naungan Komisariat Ki Ageng Ganjur, terkhusus kepada kader dan anggota PMII Rayon Syariah yang telah menghidupkan budaya intelektual PMII.

PMII sebagai organisasi kemahasiswaan berbasis teologi Aswaja sudah memang sepatutnya mampu menghidupkan nilai ajaran Aswaja dan semangat gerakan kemahasiswaan. Melalui dua nilai tersebut kita harus tersadar akan tanggung jawab dan tugas kita sebagai kader pergerakan untuk mencapai tujuan organisasi se-ideal-idealnya.

PMII sebagai organisasi yang berorientasi pada semangat perjuangan dalam penghapusan penindasan sudah seharusnya mampu melahirkan kader-kader inti ideologis. Kader militan dan loyal yang mampu menghidupkan organisasi dengan kematangan ideologisasi yang sempurna. Salah satu cara untuk mencapai kematangan ideologisasi adalah dengan terus belajar, terus berproses dan terus berjuang.

Terimakasih, kepada kader Rayon Syariah khususnya, melalui bentuk materi ideologisasi yang termuat dalam buku ini harapannya mampu mempermudah proses belajar dan meningkatkan kematangan ideologisasi bagi seluruh anggota dan kader PMII khususnya di bawah naungan Komisariat Ki Ageng Ganjur UIN K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan. Melalui karya ini kita harus bersama-sama kembali untuk meningkatkan budaya intelektual organik yang seharusnya menjadi pola kebiasaan kader dan anggota PMII.

Salam Pergerakan...!!!

Pekalongan, Juni 2023

Muhamad Misbahudin

KATA PENGANTAR
(KETUA PMII RAYON SYARIAH
KOMISARIAT KI AGENG GANJUR UIN K.H.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN)

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segalanya untuk kita sehingga kita dapat eksis sampai sekarang. Alhamdulillah wa syukur lillah, Dalam waktu yang relatif singkat PR PMII Syariah 2022-2023 bergembira dan berbesar hati karena dapat membuat karya, Buku Saku PMII. Karya seperti ini dan bentuk lainnya mungkin telah lama ditunggu-tunggu oleh warga PMII.

Tidak perlu kiranya untuk menjelaskan apa isi yang terkandung dalam buku ini, penulis dan penyunting sudah dengan sendirinya berbicara untuk itu. PR PMII Syariah justru ingin menyampaikan bahwa adanya buku ini adalah sebuah bentuk merawat tradisi intelektual yang mulai tergantikan dengan budaya praktis tanpa berbasis nilai keilmuan dan budaya taktis dalam memenuhi lini lini penting kehidupan, karena bicara PMII secara historis pasti merujuk pada

mahasiswa NU yang memiliki intelektual cukup bahkan tinggi.

Disela-sela menjalankan roda organisasi kami PR PMII Syariah menyelesaikan buku ini dengan tujuan untuk memberikan karya yang bisa menjadi rujukan dalam berproses di PMII, hadirnya buku ini juga merupakan bentuk keseriusan PR PMII Syariah dalam membangun iklim organisasi yang berbasis pada keilmuan.

Terimakasih kepada sahabat PR PMII Syariah yang sudah mensukseskan pembuatan buku ini terutama Tim kaderisasi dan kojahan pergerakan, semoga karya ini berguna bagi para pembaca dan semoga amal kita menjadi amal jariyah, aamiin.

Wassalam.

Pekalongan 2023

Wisnu Akbar Prihatnala

DAFTAR ISI

SOSIO HISTORIS KELAHIRAN PMII

A. LATAR BELAKANG	17
B. ORGANISASI SEBELUM PMII.....	18
C. PERJALANAN KELAHIRAN PMII.....	21
D. STRUKTURAL PMII	28
E. NILAI FILOSOFIS PMII.....	30
F. PENGKADERAN PMII.....	38

DINAMIKA PERKEMBANGAN SETELAH LAHIR

A. BERPERAN DIUSIA MUDA	41
B. DEPENDENSI	43
C. INDEPENDENSI	44
D. INTERDEPENDENSI.....	51

NILAI DASAR PERGERAKAN PMII

A. LATAR BELAKANG	59
B. SEJARAH PERUMUSAN.....	59
C. FUNGSI DAN KEDUDUKAN NDP.....	63

D. NILAI FILOSOFIS PILAR NDP	65
KOPRI PMII	
A. PENGERTIAN DAN ORIENTASI KOPRI	74
B. SEJARAH DAN DINAMIKA PERKEMBANGAN KOPRI	76
C. PENGKADERAN KOPRI PMII	82
ASWAJA	
A. HISTORIS MUNCULNYA ASWAJA ...	84
B. PAHAM ASWAJA	90
SEBUAH REFLEKSI	
A. RELEVANSI KADERISASI	109
B. INTERNALISASI NILAI SEBAGAI KADER INSAN ULUL ALBAB	116
C. PMII DAN KOPRI	123
D. GENDER DAN DOMINASI PATRIARKI	126
E. PMII, NU, dan ASWAJA	136

TUJUAN PMII

“Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah S.W.T, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia”

TRILOGI PMII

Tri Motto : Dzikir, Fikir, Amal Soleh

Tri Khidmat: Taqwa, Intelektual, Profesional

Tri Komitmen: Kejujuran, Kebenaran, Keadilan

IDEOLOGI PMII

“Islam *Ahlussunah Wal Jama'ah* sebagai nilai haluan organisasi PMII”

ASAS dan SIFAT PMII

“PMII berasaskan Pancasila yang bersifat Kemahasiswaan, Keislaman, Kebangsaan, Kemasyarakatan, Independen, Profesional.

SOSIO HISTORIS KELAHIRAN PMII

A. LATAR BELAKANG

Ide ini bermula dari hasrat kuat mahasiswa NU yang ingin mendirikan organisasi kemahasiswaan yang berbasis Nahdhliyin dengan ideologi *Ahlussunah Wal Jama'ah*. Ada beberapa hal yang melatar belakangi hal tersebut, diantaranya:

1. Realitas politik, bahwa pada masa itu sudah banyak organisasi kemahasiswaan yang menjadi *underbouw* partai politik
2. Organisasi kemahasiswaan islam pada saat itu hanya ada HMI yang berafiliasi dengan Masyumi (secara ideologi bersebrangan dengan NU)
3. IPNU sebagai organisasi yang dibentuk PBNU tak mampu mewadahi pemikiran dan gerakan mahasiswa NU yang ada didalamnya

Namun, dengan alasan tersebut PBNU tak cepat merestui berdirinya PMII dikarenakan alasan bahwa IPNU yang masih berumur muda

ditakutkan akan terjadi ketimpangan dan tak terurusnya IPNU sendiri yang baru dibentuk tahun 1954.

Walaupun berjalanya waktu berdiri beberapa organisasi kemahasiswaan NU seperti IMANU, PMNU, dan KMNU yang bernasib tak berumur panjang. Semangat mahasiswa NU masih terus membara, dari Muktamar I IPNU di Malang 24 Februari-5 Maret 1955 sampai Muktamar III IPNU di Cirebon masih terus diperjuangkan berdirinya PMII sebagai organisasi kemahasiswaan NU.

Sampai pada akhirnya, lahirlah Departemen Perguruan Tinggi IPNU pada Muktamar IPNU III sebagai departemen yang ada di dalam tubuh IPNU sendiri. Ini menjadi cikal bakal PMII sebelum berdiri secara kelembagaan. Namun, DPT IPNU ini sendiri juga tak berumur panjang.

B. ORGANISASI SEBELUM PMII

Berawal dari IPNU yang berdiri pada Kongres LP Ma'rif NU di Semarang 24 Februari 1954 sebagai organisasi pelajar NU. Namun,

bukan hanya pelajar saja yang menjadi anggota didalamnya, malahan tak sedikit dari kaum mahasiswa juga masuk dalam kepengurusan IPNU pada saat itu.

Karena dualisme inilah yang akhirnya menyebabkan ketimpangan antara pelajar dan mahasiswa yang ada di IPNU. Banyak mahasiswa yang terbatas ruang geraknya ketika berkumpul dengan pelajar yang *notabene*nya mempunyai pemikiran cenderung berbeda dari mahasiswa.

Dibawah gejolak tekanan mahasiswa NU yang ada di IPNU, akhirnya lahir beberapa organisasi kemahasiswaan NU pada sekitar akhir tahun 1955 seperti Ikatan Mahasiswa NU (IMANU) di Jakarta, Persatuan Mahasiswa NU (PMNU) di Bandung, dan Keluarga Mahasiswa NU (KMNU) di Surakarta, dan banyak organisasi-organisasi kecil lain yang tersebar di berbagai kota.

Namun dalam perjalanannya, ternyata organisasi tersebut tak berumur panjang, hanya

KMNU-lah yang bertahan sebelum kelahiran PMII di tahun 1960. Faktor yang melatar belakangi hal tersebut tak berbeda dengan alasan sebelumnya kenapa PMII masih sulit untuk berdiri, yaitu dengan alasan pertimbangan internal IPNU sendiri.

Sampai pada akhirnya, dibentuklah Departemen Perguruan Tinggi IPNU pada Muktamar III IPNU di Cirebon 27-31 Desember 1958, namun DPT IPNU ini yang sebagai badan di dalam struktural IPNU dalam menampung segala aspirasi dari mahasiswa tak banyak memberikan arti jelas.

Hal tersebut didasari, jika lembaga tersebut berada didalam tubuh IPNU, artinya masih sama bahwa pemikiran dan gerakan mahasiswa masih terbatas struktural. Hal lain yang juga menjadi problem bagi kaum mahasiswa sendiri adalah bahwasanya DPT IPNU yang secara bentuk sebagai lembaga dalam suatu tubuh organisasi tidak bisa masuk sebagai anggota keorganisasian PPMI (Persatuan Perhimpunan Mahasiswa

Indonesia) yaitu suatu konfederasi organisasi mahasiswa ekstra Universitas, terlebih pada MMI (Majlis Mahasiswa Indonesia) sebagai federasi dari dewan/senat mahasiswa pada saat itu.

C. PERJALANAN KELAHIRAN PMII

Gejolak Mahasiswa Nahdhliyin

Banyaknya upaya upaya yang dilakukan mahasiswa NU sebelumnya dalam mendirikan organisasi kemahasiswaan terlihat sangat penuh perjuangan, gagalnya berbagai organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang terbentuk ternyata tak mampu memuaskan hasrat mahasiswa.

Karena NU yang saat itu menjadi partai politik sendiri memperoleh urutan ke tiga dalam pemilu 1955. Hal inilah yang membuat mahasiswa NU mempunyai hasrat kuat untuk membentuk organisasi kemahasiswaan guna basis pengkaderan partai politik NU. Mengingat kondisi politik dan keamanan dalam negeri pada saat itu, mengharuskan mahasiswa islam mempunyai basis dan ideologi yang kuat tentunya, terkhusus bagi mahasiswa Nahdhliyin.

Namun perlu digaris bawahi, walaupun berdirinya PMII berangkat atas dasar realitas politik pada masa itu, PMII didirikan karena perjuangan idealisme mahasiswa islam sendiri.

Bahkan karena minimnya SDM dari kalangan NU sendiri, NU terpaksa meng-NU-kan sarjana sarjana dari luar lingkungan nahdhliyin guna menjabat kursi kursi politik. Hal ini bukan karena serta merta minimnya kalangan intelektual dari kaum nahdhliyin, NU saat itu masih terlalu konservatif dalam memandang kalangan muda guna membentuk gerakan gerakan dalam politik, hingga dipersulitnya pendirian organisasi kemahasiswaan NU sendiri.

Muktamar IPNU I dan II

IPNU pada awal pendiriannya yang dilaksanakan pada Kongres LP Ma'arif NU di Semarang 24 Februari 1954, yang menyertakan intelektual muda dari kaum mahasiswa ternyata berjalanya waktu membuat kesenjangan gerakan dan pemikiran antara mahasiswa dan pelajar.

Hingga pada Mukttamar I IPNU di Malang 24 Februari-5 Maret 1955, mulai muncul wacana pendirian organisasi kemahasiswa NU. Namun ternyata hal ini belum bisa disetujui oleh PBNU sendiri mengingat IPNU yang masih berumur muda dikhawatirkan mengganggu proses tumbuh kembang dari IPNU. Yang akhirnya berdiri berbagai organisasi NU di akhir tahun 1955, namun tak bisa berumur panjang karena memang tak ada restu sendiri dari pimpinan PBNU.

Namun semangat mahasiswa NU berlanjut pada Mukttamar IPNU II di Pekalongan 1-5 Januari 1957. Dengan berbagai latar belakang mengenai kondisi sosial politik dan ruang baru bagi mahasiswa NU sendiri untuk bergerak. Tetapi lagi lagi mendapatkan respon yang tidak serius dengan dalih IPNU yang masih berumur muda membutuhkan konsolidasi yang matang guna perkembangannya.

Mukttamar IPNU III

Berlanjut pada Mukttamar III IPNU di Cirebon 27-31 Desember 1958, hasrat mahasiswa NU

masih kuat. Hingga diputuskan untuk mendirikan Departemen Perguruan Tinggi IPNU sebagai wadah aspirasi mahasiswa yang berada di tubuh IPNU, yang diketuai oleh Ismail makky.

Secara historis DPT inilah yang menjadi tonggak awal berdirinya PMII, walaupun pada kenyatannya DPT IPNU tak lagi mampu membendung keinginan mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi kemahasiswaan

Konbes IPNU I

Puncaknya pada Konferensi Besar I IPNU di Kaliurang, Yogyakarta 14-17 Maret 1960, Ismail Makky sebagai Ketua DPT IPNU dan Moh. Hartono, B.A Ketua I PP IPNU berbicara didepan peserta Konbes yang mempertegas keinginan mereka dalam mendirikan organisasi mahasiswa NU.

Yang pada akhirnya, hasil Konbes disetujui untuk mendirikan organisasi mahasiswa NU dengan membentuk panitia pelaksana Musyawarah Mahasiswa NU yang harus

dilakukan dengan jangka limit 1 bulan setelah Konbes. Panitia tersebut terdiri dari 13 mahasiswa, diantaranya;

1. Sahabat Cholid Mawardi (Jakarta)
2. Sahabat Said Budairy (Jakarta)
3. Sahabat M. Sobich Ubaid (Jakarta)
4. Sahabat M. Makmum Syukri (Bandung)
5. Sahabat Hilman (Bandung)
6. Sahabat Ismail Makky (Yogyakarta)
7. Sahabat Munsif Nahrawi (Yogyakarta)
8. Sahabat Nuril Huda Suaidy (Surakarta)
9. Sahabat Laily Mansur (Surakarta)
10. Sahabat Abd. Wahab Jaelani (Semarang)
11. Sahabat Hisbullah Huda (Surabaya)
12. Sahabat M. Cholid Narbuko (Malang)
13. Sahabat Ahmad Husain (Makasar)

Yang selanjutnya 3 orang dari pendiri diatas, yaitu Sahabat Hisbullah Huda, Sahabat M. Said Budairy, dan Sahabat Makmum Syukri, pada tanggal 19 Maret 1960 berangkat ke Jakarta menghadap Ketua PBNU saat itu yaitu K.H Idham Khalid untuk meminta nasihat sebagai

pegangan pokok dalam Musyawarah mahasiswa nantinya

Dan pada tanggal 24 Maret 1960 mereka diterima dikantor PBNU, selain memberikan nasihat sebagai pegangan dalam musyawarah nanti, ketum PBNU juga menjelaskan bahwa diharapkan nantinya organisasi yang dibentuk dapat bermanfaat bagi PBNU dan mahasiswa mempunyai prinsip ilmu untuk rakyat buka ilmu untuk ilmu.

Musyawarah mahasiswa NU

Dan akhirnya musyawarah mahasiswa NU se-Indonesia terselenggara pada 14-16 April 1960 di Sekolah Mu'alimat NU Wonokromo Surabaya yang membahas sesuai keputusan Konbes I IPNU lalu. Pertemuan ini menghasilkan beberapa hal berikut:

1. Berdirinya organisasi Nahdhliyin bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. Penyusunan Peraturan Dasar PMII

3. Hari lahir PMII ditetapkan pada 17 April 1960
4. Memutuskan 3 orang formatur kepengurusan yakni, H. Mahbub Junaidi (Ketua Umum), A. Khalid Mawardi (Ketua Satu), dan Said Budairy (Sekretaris Umum) Pucuk Pimpinan PMII yang sekarang menjadi Pengurus Besar PMII (Diubah pada Kongres V PMII di Ciloto Jawa Barat 23-28 Desember 1973, beserta struktural dibawah PB hingga seperti sekarang)

Dan juga terbentuk beberapa cabang PMII dari ke delapan kota asal 13 panitia sponsor pendiri PMII.

Karena dalam Musma NU di Surabaya hanya menghasilkan Anggaran Dasar saja, maka pada 8-9 September 1960 PB PMII menyelenggarakan sidang pleno II mengesahkan Anggaran Rumah Tangga PMII.

Sebelum sidang, PB PMII membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Said Budairy dengan anggota Chalid Mawardi dan Fachrurrazi AH untuk merumuskan Anggaran Rumah Tangga tersebut.

D. STRUKTURAL PMII

Kelembagaan

PMII merupakan organisasi struktural vertikal mempunyai kepengurusan yang berada di pusat hingga di tiap fakultas kampus, kepengurusannya meliputi;

1. Pengurus Besar (PB PMII) yang bertingkat nasional
2. Pengurus Kordinator Cabang (PKC PMII) yang bertingkat di wilayah Provinsi
3. Pengurus Cabang (PC PMII) yang bertingkat di wilayah Karesidenan/Kota/Kabupaten atau Pengurus Cabang Internasional (PCI) yang berada di luar negeri dan berada dibawah pengawasan PB PMII secara langsung.
4. Pengurus Komisariat (PK PMII) yang bertingkat di wilayah Universitas
5. Pengurus Rayon (PR PMII) yang bertingkat di wilayah Fakultas

Permusyawaratan

Dalam permusyawaratanya, PMII mempunyai hirarki sebagai berikut;

1. Kongres PB PMII
2. Muspimnas PB PMII (Musyawarah Pimpinan Nasional)
3. Rakernas PB PMII (Rapat Kerja Nasional)
4. Rapat Pleno Lengkap
5. Rapat Pleno BPH PB PMII
6. Konkorcab PKC PMII Konferensi Kordinator Cabang)
7. Muspimda PKC PMII (Musyawarah Pimpinan Daerah)
8. Rakerda PKC PMII (Rapat Kerja Daerah)
9. Rapat Pleno BPH PKC PMII
10. Konfercab PC PMII (Konferensi Cabang)
11. Muspimcab PC PMII (Musyawarah Pimpinan Cabang)
12. Rakercab PC PMII (Rapat Kerja Cabang)
13. Rapat Pleno BPH PC PMII
14. RTK PK PMII (Rapat Tahunan Komisariat)
15. Rapat Pleno BPH PK PMII

16. RTAR PR PMII (rapat Tahunan Anggota Rayon)
17. Rapat Pleno BPH PR PMII
18. Kongres Luar Biasa
19. Konkorcab Luar Biasa
20. Konfercab Luar Biasa
21. RTK Luar Biasa
22. RTAR Luar Biasa

Catatan;

1. Dalam hal hal mendesak, lembaga mengharuskan untuk membuat musyawarah luar biasa.
2. Rapat Pleno Lengkap dihadiri oleh BPH PB PMII, Ketua PKC PMII, dan Ketua Kopri PKC PMII, untuk mengkordinasikan perkembangan Cabang PMII dibawah naungan PKC masing masing
3. Rapat Pleno BPH dilakukan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya mendesak dan belum diatur di AD/ART

E. NILAI FILOSOFIS PMII

Dibalik nama PMII

Forum mahasiswa sepakat dalam membentuk dan memberi nama organisasi dengan indikator beberapa hal, meliputi;

1. Menunjukkan sifat kedinamisan sebagai organisasi mahasiswa
2. Menampakan identitas keislaman, namun tak perlu mencantumkan nama NU
3. Memanifestasikan semangat nasionalisme

Awalnya, penamaan organisasi mengalami sedikit perdebatan diantara mahasiswa sendiri. Lalu akhirnya disepakati namanya menjadi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang disusulkan oleh delegasi Bandung dan diperkuat dari Surakarta.

Makna “Pergerakan” disini merupakan representasi dari hamba yang senantiasa bergerak, baik individual mampu organisatoris. Makna “Pergerakan” PMII diharapkan menjadi potensi segala pengembangan menuju organisasi yang lebih ideal.

Makna “Mahasiswa” adalah golongan kaum akademisi yang mempunyai citra diri sebagai insan yang berintegritas, religius, insan sosial, dan insan mandiri. Merupakan tanggung jawab moral yang harus diwujudkan oleh mahasiswa sendiri.

Pengertian “Islam” merupakan sebagai islam yang berparadigma *ahlussunah wal jama'ah*. Merupakan konsep yang proporsional dalam segi pemikiran dan pergerakan dalam melihat dinamika masyarakat.

Pengertian “Indonesia” sendiri diartikan sebagai masyarakat atau bangsa, dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar hukum bernegara.

Tujuan

Tujuan PMII sesuai yang termaktub dalam AD PMII BAB IV Pasal 4, yaitu “Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya,

serta komitmen memperjuangkan cita cita kemerdekaan Indonesia.”

Tujuan PMII yang tertulis pada Anggaran Dasar (dulunya Peraturan Dasar) PMII merupakan salah satu hasil dari Musyawarah Mahasiswa NU di Surabaya yang disepakati berlaku pada 17 April 1960.

Logo

Dalam Sidang Pleno II PB PMII, yang diselenggarakan pada 8-9 September 1960. Selain mengesahkan Anggaran Rumah Tangga PMII, diserahkan juga bentuk logo oleh Said Budairy kepada BPH PMII yang selanjutnya diputuskan bentuk logo PMII yang seperti kita kenal sekarang.

Mars

Mars PMII yang kita kenal sekarang adalah hasil cipta dari Shaimoery Wignjo Soebroto sebagai pencipta lagu bersama Mahbub Djunaedi sebagai pencipta syair mars PMII.

Lagu mars PMII memanifestasikan beberapa pesan gerakan yang musti dilakukan oleh kader PMII. *Pertama*, PMII mesti mengesksiskan diri pada panggung Indonesia. Hal ini termaktub dari bait ke-1 yang menandakan bahwa kader PMII harus mampu mewarnai Indonesia baik dalam ranah Politik, Sosial Ekonomi, dan Agama, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Kedua, PMII harus mencurahkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk membebaskan sosial-politik yang hegemonik menuju masyarakat yang bebas, merdeka, adil, dan makmur. Hal ini termaktub dari bait ke-2 dan ke-3 dari lagu mars yang menandakan akan pembelaan kader PMII kepada masyarakat yang termarjinalkan oleh hegemoni sosial dan kaum kaum *mustadhafin*.

Ketiga, keharusan untuk membangun pilar-pilar agama Islam. Hal ini termaktub dari syair mars PMII dari bait ke-1 sampai ke-3. Tidak dapat dipungkiri bahwa PMII secara historis

merupakan warga Nahdliyin (NU) yang memiliki ranah gerak religius atau agamis. Kader PMII diharapkan mampu membangun citra Islam yang sesuai dengan tradisi ke-NU-an. Yakni Islam yang bercirikan ke-Indonesiaan.

Trilogi dan Eka Citra Diri

Seperti yang kita ketahui bahwa Trilogi PMII terdiri dari, tiga hal. *Pertama*, Tri Motto : Dzikir, Fikir, Amal Soleh. Hal tersebut wajib tertanam pada diri setiap kader PMII sebagai arah melangkah dalam menjani kehidupan didunia sebagai *khalifah fil ard*. Selalu mengingat akan keberadaan sang *Kholiq* pemberi petunjuk. Kemudian menafsirkan setiap petunjuk tersirat dari-Nya.

Kedua, Tri Khidmat: Taqwa, Intelektual, Profesional. Yang merupakan kapasitas diri yang wajib dimiliki oleh setiap kader PMII. Taqwa akan membawa pada pemahaman melaksanakan perintah Allah SWT, yang kemudian didukung oleh kadar intelektual yang cukup sehingga tumbuh kesadaran dalam menjalankan perintah

Allah SWT. Sehingga nampaklah sifat profesionalisme.

Ketiga, Tri Komitmen: Kejujuran, Kebenaran, Keadilan. Jujur sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT. Kebenaran dalam berucap dan bertindak. Serta adil dalam memihak, agar kedamaian dapat terjaga.

Kemudian eka citra diri PMII yang sebagaimana dicetuskan adalah sebagai insan Ulul Albab, yang didefinisikan sebagai seseorang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan dan tak lupa mengayun dzikir.

Trilogi dan citra diri PMII pertama kali dicetuskan dan disahkan di Deklarasi Format Profil PMII pada Kongres PMII ke-X di Jakarta 27 Oktober 1991, yang merupakan kristalisasi dari tujuan PMII sendiri

Ideologi

Ideologi PMII adalah Islam *Ahlussunah Wal Jama'ah*. Nilai ini merupakan aktualisasi PMII

sebagai organisasi yang tak lepas dari ajaran NU sendiri yang menggunakan konsep Aswaja dalam metode dakwahnya, dan sebagai metode *manhaj al-fikr wal harokah*.

Aswaja PMII disini bersumber pada beberapa imam mahdzab, seperti Akidah yang menganut imam Abu Hasan Al Asy'ari dan imam Abu Mansur Al Matturidy. Dalam bidang Fikih menganut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Kemudian dalam bidang tasawuf menganut Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali.

Asas dan Sifat

PMII sendiri sesuai yang tertulis dalam AD Pasal 2 Bab 2, berazaskan Pancasila, Keputusan ini merupakan hasil dari Kongres VIII PMII di Bandung 16-20 Mei 1985 dengan pertimbangan;

1. Bahwa nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak bertentangan dan dibenarkan dalam islam sendiri

2. Pancasila hanyalah pegangan pokok dalam bernegara, jadi bukan tandingan dari agama.
3. Pancasila merupakan hasil kesepakatan dari berbagai kelompok masyarakat guna menuju kesatuan politik bersama.

Adapun sifat PMII sesuai yang termaktub dalam AD pada Pasal 3 Bab 3 adalah keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, independen, dan profesional. Nilai-nilai tersebut merupakan suatu bentuk arah gerak dari PMII sendiri sebagai organisasi kemahasiswaan berhaluan aswaja yang mengedepankan kepentingan masyarakat Indonesia tanpa kepentingan dari pihak manapun.

F. PENGKADERAN PMII

MAPABA

Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) merupakan jenjang pengkaderan pertama bagi mahasiswa yang ingin masuk ke PMII. Diselenggarakan oleh pengurus Rayon/Komisariat/Cabang. Aturan aturan pokok mengenai MAPABA pertama kali di tetapkan

pada Sidang Pleno II PB PMII pada 8-9 September 1960.

MAPABA secara umum bertujuan untuk membentuk anggota yang berkualitas *Mu'taqid*, atau anggota yang yakin terhadap organisasi.

PKD

Pelatihan Kader Dasar (PKD) merupakan jenjang pengkaderan kedua setelah MAPABA bagi anggota PMII. Diselenggarakan oleh pengurus Rayon/Komisariat/Cabang. Secara umum PKD bertujuan untuk membentuk kader *Mujahid* yaitu kader ideologis, loyal, militan, serta komitmen dan integritas terhadap nilai nilai organisasi.

PKL

Pelatihan Kader Lanjut (PKL) merupakan jenjang pengkaderan ketiga setelah PKD bagi kader PMII. Diselenggarakan oleh pengurus Cabang/Kordinator Cabang. Secara umum PKL

bertujuan untuk membentuk kader *Mujtahid* yaitu kader pelopor, inovatif, dan kreatif.

PKN

Pelatihan Kader Nasional (PKN) merupakan jenjang pengkaderan terakhir setelah PKL bagi kader PMII. Diselenggarakan oleh Pengurus Besar PMII. Secara umum PKN bertujuan untuk membentuk kader *Muharrir* yaitu kader pemimpin yang berwawasan luas dan berkualitas sebagai pelopor pergerakan.

DINAMIKA PERKEMBANGAN SETELAH LAHIR

A. BERPERAN DIUSIA MUDA

Jika melihat sejarah, PMII memang bukan organisasi baru. Organisasi ini merupakan sempalan dari NU, yang bisa dikatakan anak kandung NU. Tentu ini *previlage* bagi PMII sendiri, di usia muda saja sudah menembus forum forum Internasional. Dibuktikan oleh Said Budairy (Sekretaris Umum PMII) yang pada September 1960 mewakili PMII dalam forum pemuda sedunia di Moskow, sepulangnya singgah di Mesir untuk konsolidasi dengan mahasiswa NU yang berada di luar negeri. Yang disusul oleh Chalid Mawardi selaku Ketua 1 PB PMII pada Juni 1961 juga berangkat ke Moskow dengan acara yang sama.

Pada tahun 1966, PMII memberikan peran yang sangat besar bagi organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan dalam mencapai stabilitas nasional. Pada tahun tersebut, Zamroni selaku Ketua PB PMII juga dipercayai memimpin

Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), yang diikuti oleh PMII, PMKRI, HMI, dan Mapancas. Gerakan PMII dalam KAMI mampu menginspirasi banyak kelompok hingga muncul berbagai kelompok solidaritas lainya.

Meskipun, dalam historisnya PMII dan HMI mengawali sedikit gesekan karena banyak kader HMI yang putar balik ke PMII. Namun, PMII justru ikut bersolidaritas dalam memperjuangkan HMI yang terancam dibubarkan oleh Soekarno pada waktu itu. Alasan terlalu dekat dengan Masyumi tak membuat PMII buang muka untuk membentuk kelompok solidaritas dengan kelompok kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa islam untuk memperjuangkan HMI agar selamat.

Gerakan lain dari PMII juga bisa kita lihat dalam historis lahirnya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Zamroni bersama 34 orang pemuda Indonesia berhasil mencetuskan deklarasi pemuda hingga lahirnya KNPI pada tahun 1973.

Dan gerakan mahasiswa yang juga eksis adalah kelompok Cipayung. Kelompok ini berdiri pada 20-22 Januari 1972 yang berisi kelompok dari organisasi GMNI, GMKI, HMI, dan PMKRI yang menyatukan wadah kebersamaan dalam mempertahankan idealisme organisasi mahasiswa. PMII yang saat itu masih dependen dengan NU tak bisa masuk menjadi anggota. Akhirnya setelah Independensi, pada tahun 1974 PMII bergabung dengan kelompok Cipayung.

B. DEPENDENSI

Perlu diingat, PMII lahir dari cikal bakal DPT IPNU yang merupakan banom NU secara tidak langsung dikatakan PMII merupakan bagian dari NU secara struktural dan kelembagaan. Sejak kelahiran 17 April 1960, PMII menjadi sayap partai politik NU sebagai alat politik guna memperkuat partai NU hingga tahun 1972 PMII menyatakan Independen

Pada masa dependen PMII dengan NU tentunya secara pengajaran dan doktrin tak berbeda. Secara kultural dan struktural PMII

selalu mengikuti NU. Apa yang dibutuhkan NU dan apa yang diperlukan NU kepada PMII otomatis harus diusahakan untuk dipenuhi, karena masa dependensi berarti PMII menjadi banom NU seperti halnya IPNU/IPPNU.

C. INDEPENDENSI

Gagasan Independensi muncul pada Kongres IV di Makasar 25-30 April 1970, oleh sahabat Yahya Umar yang saat itu menjabat sebagai ketua umum PC PMII Yogyakarta. Sebelumnya pun sebenarnya gagasan Independensi sering dilontarkan dalam forum ketika momen-momen dengan PB PMII, dan Cabang Yogyakarta merupakan kelompok yang cukup kritis dalam hal ini. Karena dengan argumen PMII terutama pengurus pusat yang sudah terlalu dalam ikut politik praktis.

Alasan lain yang mengharuskan PMII Independen adalah karena pada saat itu muncul wacana penggabungan fraksi partai politik, yang mengharuskan partai Politik NU dan partai politik lain menjadi satu dengan partai yang

berhaluan agamis di partai fraksi PPP. Kenyataan ini menjadi dilematis bagi PMII sendiri. Karena dengan penggabungan NU dengan parpol lain maka secara otomatis PMII kehilangan NU sebagai induknya, sebab NU sendiri hanya menjadi *underbouw* dari partai politik. Dari ringkasan pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan beberapa poin mengenai alasan kenapa PMII menyatakan Independensi antara lain:

- 1) Independensi PMII merupakan proses rekayasa sosial PMII dalam berkehidupan bernegara dan berbangsa sebagai proses penemuan jati diri
- 2) Kader kader PMII sudah malas ikut dalam konflik politik yang justru melemahkan gerakan mahasiswa sendiri
- 3) Enggannya kader PMII selalu dijadikan alat politik guna keentingan partai bukan kaderisasi
- 4) PMII merasa canggung atas struktural dengan NU yang akhirnya menjadikan PMII secara gerakan terbatas

Melihat kondisi demikian, Zamroni yang saat itu menjabat ketua umum PB PMII menyambut gagasan independensi dengan catatan hanya lepas secara struktural organisatoris saja, namun masih dalam ajaran islam *Ahlussunah Wal Jamaah* yang juga menjadi pegangan PMII. Menurut Mahbub Djunaedi sendiri gagasan independensi PMII merupakan bentuk dinamika anak muda NU yang sudah acuh dengan konflik partai politik yang berkepanjangan.

Akhirnya setelah berkonsultasi dengan beberapa pengurus PBNU, dilaksanakannya Musyawarah Besar kedua sebagai forum guna pembahasan suatu hal yang mendesak ini. Mubes ini dilaksanakan pada 14-17 Juli 1972 di Murnajati, Lawang Malang yang menghasilkan Deklarasi Murnajati pada tanggal 14 Juli, kemudian dibentuk panitia perumus sikap independensi pada tanggal 15 Juli yang berjumlah 8 orang, antara lain; Umar Basalim (Bandung), Madjidi Syah (Bandung), Muhammad Iskandar (Bandung), Slamet Effendy Yusuf (Yogyakarta), Choirunnisa Yafizham

(Medan), Tatik Farikhah (Surabaya), Rahman Idrus (Makasar), Muis Kabri (Malang).

Akhirnya pada tanggal 17 Juli 1972 diputuskan Deklarasi Murnajati sebagai bentuk independensi PMII, sebagai berikut:

DEKLARASI MURNAJATI

Bismillahirrahmanirrahim

“Kamu sekalian adalah sebaik-baik ummat yang dititahkan kepada manusia untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar”.

- *Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia insaf dan yakin serta bertanggungjawab terhadap masa depan kehidupan bangsa yang sejahtera sekaligus penerus perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan material dan spiritual, bertekad untuk mempersiapkan dan mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya.*
- *Bahwa pembangunan dan pembaharuan mutlak diperlukan insan-insan Indonesia yang memiliki pribadi luhur, taqwa kepada Allah, berilmu, dan cakap serta tanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuan.*

- *Bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia selaku generasi muda Indonesia, sadar akan peranannya untuk ikut serta bertanggung jawab bagi berhasilnya pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.*
- *Bahwa perjuangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan idealisme sesuai dengan jiwa*
- *Deklarasi Tawangmangu menurut perkembangannya merupakan sifat-sifat kreatif, keterbukaan dalam sikap dan pembinaan rasa bertanggung jawab.*
- *Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia memohon rahmat Allah SWT, dengan ini menyatakan diri sebagai Organisasi “**Independen**” yang tidak terkait tindakannya kepada siapapun dan hanya komitmen dengan perjuangan nasional yang berlandaskan Pancasila.*

Pada akhirnya Deklarasi Murnajati tersebut kembali ditegaskan pada Kongres ke-V Ciloto Bandung 28 Desember 2023 pada keputusan monumental yang dikenal Manifesto independen, dengan bunyi sebagai berikut:

MANIFESTO INDEPENDENSI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrohim

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia insaf dan yakin serta bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan bangsa yang sejahtera, selaku penerus perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan material dan spiritual, bertekad untuk mempersiapkan dan mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya.

Bahwa pembangunan dan pembaharuan mutlak diperlukan insan-insan Indonesia yang memiliki pribadi luhur, taqwa kepada Allah, berilmu dan cakap serta tanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia selaku generasi muda Indonesia, sadar akan peranannya untuk ikut serta bertanggung jawab bagi berhasilnya pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Bahwa pada dasarnya pengisian kemerdekaan adalah didukung oleh kemampuan intelektual manusiawi dengan sosialisasi ilmu ke sikap kultural guna mengangkat martabat dan derajat bangsa.

Bahwa pada hakekatnya “independensi” sebagaimana telah dideklarasikan di MURNAJATI adalah merupakan manifestasi keadaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang meyakini sepenuhnya terhadap tuntutan-tuntutan keterbukaan sikap, kebebasan berpikir dan pembangunan kreativitas yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam.

Bahwa “independensi” Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dimaksudkan dalam mendinamisasi dan mengembangkan potensi kultural yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam untuk terbentuknya pribadi luhur dan bertaqwa kepada Allah, berilmu dan cakap serta bertanggung jawab dalam perjuangan nasional berdasarkan Pancasila.

Bahwa dengan “independensi” Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, tersedia adanya kemungkinan-kemungkinan alternatif

yang lebih lengkap lagi bagi cita-cita perjuangan organisasi yang berlandaskan Islam dan berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah.

D. INTERDEPENDENSI

Karena antara PMII-NU mempunyai persamaan-persamaan dalam paham keagamaan dan perjuangan, visi sosial kemasyarakatan, ikatan historis, kesamaan nilai, kultur, tradisi, ideologi dan akidah. Maka untuk menghilangkan kecurigaan dan keraguan akan berpalingnya PMII dari paham-paham Aswaja, PMII menyatakan sikap Interdependensi, yaitu suatu sikap yang tidak saling mengintervensi secara struktural dan kelembagaan, tetapi memiliki visi dan tujuan yang sama.

Deklarasi Interdependensi dicetuskan pada Kongres ke-X PMII di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta 27 Oktober 1991 sebagai jawaban atas isu dan gagasan yang muncul sebelumnya. Berikut Deklarasi Interdependensi PMII-NU:

DEKLARASI INTERDEPENDENSI PMII-NU

1. *Sejarah mencatat, bahwa PMII dilahirkan dari pergumulan panjang mahasiswa nahdliyin, dan sejarah juga membuktikan bahwa PMII telah menyatakan independensinya melalui Deklarasi Murnajati tahun 1972.*
2. *Kerangka berpikir, perwatakan dan sikap sosial antara PMII dan NU mempunyai persamaan karena dikemas dalam pemahaman Islam Ahlusunnah wal Jamaah.*
3. *PMII insyaf dan sadar bahwa bidang dan lahan perjuangan sangat luas dan bervariasi sesuai dengan nuansa usia, jaman dan bidang garapannya.*
4. *PMII insyaf dan sadar bahwa dalam melakukan perjuangan diperlukan untuk saling tolong-menolong 'Ta'awanu alal birri wattaqwa', ukhuwah Islamiyah (izzul islam wal muslimin) serta harus mencerminkan "Mabadi Khairu Ummah"*

(prinsip-prinsip umat yang baik), oleh karena PMII siap melakukan kerjasama.

- 5. Karena itu PMII dengan NU mempunyai persamaan-persamaan dalam persepsi keagamaan dan perjuangannya, visi sosial dan kemasyarakatan, ikatan historis. Maka untuk menghilangkan keragu-raguan serta saling curiga dan sebaliknya untuk menjalin kerjasama program dan kualitatif dan fungsional, baik melalui program nyata maupun persiapan sumber daya manusia. PMII siap meningkatkan kualitas hubungan dengan NU atas dasar prinsip berkedaulatan organisasi penuh, interdependensi, dan tidak ada intervensi secara struktural dan kelembagaan, serta prinsip mengembangkan masa depan Islam Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia.*

Untuk mempertegas sikap ini, pada Mukernas PB PMII di Cimacan, Jawa Barat 24 Desember 1991, PMII merumuskan implementasi Interdependensi yang berdasar pemikiran:

1. Bahwa dalam pandangan PMII, Ulama sebagai pewaris Kenabian merupakan kedalamannya dalam pemahaman keagamaan. Oleh karena itu, Interdependensi PMII–NU ditempatkan pada konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Adanya ikatan kesejahteraan yang mempertautkan PMII – NU. Realitas sejarah bahwa PMII lahir dari dan dibesarkan oleh NU. Demikian juga latar belakang NU secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perwatakan PMII secara umum. Adapun kemudian tidak dipahami sebagai upaya mengurangi, apalagi menghapuskan arti ikatan kesejahteraan tersebut.
3. Adanya kesamaan paham keagamaan antara PMII dengan NU. Keduanya sama-sama mengembangkan suatu wawasan ke-Islaman dengan peradilan Ahlussunnah Waljama'ah. Implementasi dari persamaan wawasan ke-Islaman ini tampak pada persamaan sikap sosial yang bercirikan Tawasuth dan I'tidal,

Tasamuh, Tawazun dan Amal Ma'ruf Nahi Mungkar. Demikian juga didalam pola pikir, pola sikap, pola tindakan PMII dan NU menganut pola selektif, integratif sesuai dengan prinsip dasar: *Almuhafadzah Alalqadim As-Shalih Wal Akhdzu Bil Jadid Al-Ashlah*, maksudnya adalah kita bisa mengambil dan meneruskan segala tradisi baik yang terdahulu dan kita bisa mempraktekan tradisi sekarang yang baik juga, tentunya dengan pertimbangan matang, tradisi atau kebiasaan manakah di jaman sekarang yang kiranya itu baik.

4. Adanya persamaan wawasan kebangsaan, bagi PMII keutuhan Komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setian insan muslim indonesia, dan atas dasar hal tersebut menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara Indonesia dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara perorangan maupun bersama-sama.

5. Adanya persamaan kelompok sasaran, PMII dan begitu pula NU, memiliki mayoritas anggota dari kalangan masyarakat kelas menengah kebawah. Kesamaan lahan perjuangan ini semestinya bila kemudian melahirkan format-format perjuangan yang relatif sama pula.

Sekurang kurangnya memiliki lima prinsip yang semestinya dipegang bersama untuk merealisasikan Interdependensi PMII-NU yaitu; *Ukhuwah Islamiyah, Amar Ma'ruf nahi Munkar'* *Mubadi Khoiru Ummah, Al Musawah*, dan hidup berdampingan dan berdaulat secara penuh.

Implementasi Interdependensi PMII-NU diwujudkan dalam berbagai bentuk pikiran kerjasama antara lain meliputi bidang: Pemikiran yang dirancang untuk mengembangkan pemikiran ke-Islaman dan kemasyarakatan.. Lalu ada sumberdaya manusia yang ditekankan pada kemanfaatan secara maksimal orang orang PMII maupun NU. Kemudian di bidang pelatihan yang dirancang

untuk mengembangkan sumber daya manusia baik PMII maupun NU. Dan bidang rintisan program sebagai bentuk pengolahan suatu program secara bersama, seperti program pengembangan ekonomi, program aksi sosial, dan lain-lain.

NILAI DASAR PERGERAKAN PMII

Nilai dasar Pergerakan (NDP) PMII adalah suatu kebulatan tekad, pandangan yang secara sistematis merupakan cermin dari keyakinan islam yang berhaluan Aswaja untuk memberikan alas pijak dalam arah tingkah laku PMII sebagai suatu kelompok sosial dalam mencapai cita-cita perjuangan

Islam sebagai keyakinan mutlak bagi segenap warga PMII menempati posisi tertinggi dalam memberikan tuntunan hidup dan kehidupan. Sementara itu, Aswaja sebagai metode penghayatan/pemahaman ajaran islam tersebut merupakan hasil penyerapan dari keduanya. NDP adalah pilihan terbaik untuk keduanya untuk mewujudkan cita-cita pergerakan.

NDP PMII dibutuhkan dalam memberikan arah dan motivasi organisasi, memimpin tingkah laku warga pergerakan dan sekaligus memberikan dasar pembenaran terhadap apa yang mesti harus dilakukan untuk mencapai

tujuan perjuangan sesuai dengan maksud didirikannya PMII sendiri.

A. LATAR BELAKANG

Nilai-nilai Aswaja yang menjadi pegangan warga PMII dalam setiap gerak dan langkahnya masih sulit dipahami terutama bagi mereka yang tak pernah mengambah ilmu pesantren. Oleh karenanya nilai-nilai yang masih berserakan di berbagai kitab-kitab kuning maupun tersimpan dalam benak para ulama sendiri perlu dirumuskan dengan sistematis agar mudah dipelajari bagi warga pergerakan.

Karena konsekuensi PMII dalam mengambil langkah independensi pada saat itu secara tidak langsung mengharuskan melakukan pendekatan program selain ideologi maupun kultural historis sebagai metode rekrutmen anggota PMII. Hal ini mengharuskan PMII membuat formula rumusan baru nilai dasar organisasi agar mudah dipahami seluruh anggota organisasi.

B. SEJARAH PERUMUSAN

Kongres V-VIII PMII

Lahirnya Deklarasi Murnajati pada tahun 1972 secara otomatis memberikan PR bagi PMII untuk merumuskan pegangan baru dalam proses berorganisasi, hingga tercetuslah perumusan NDP sebagai amanat sejarah sejak Kongres ke-V di Ciloto Jawa Barat 1973 yang dianggap bahwa perumusan NDP ini sangat penting dan harus segera disusun guna arah gerak organisasi. Akhirnya pada Mukernas III PMII yang dilaksanakan di Bandung 1-5 Mei 1976 memutuskan untuk menyusun nilai-nilai dasar perjuangan PMII sebagai jawaban atas Independensi PMII pada Deklarasi Murnajati 1972.

Pada penyusunan kerangka dasar pertama ini selain merumuskan urgensi NDP bagi PMII juga merumuskan terkait pengertian, posisi, dan kerangka permasalahan NDP sendiri. Yang selanjutnya diserahkan kepada PB PMII. Proses perumusan kerangka NDP ini masih terus berlanjut hingga Kongres ke-IX PMII.

Sebelumnya pada Kongres ke-VII PMII pada 1-4 April 1981 di Cibubur, Jakarta. Komisi I organisasi membahas untuk penyempurnaan NDP yang dipimpin oleh sahabat Yusuf Muhammad menetapkan kerangka NDP sebagai berikut; Mukaddimah, Pengertian NDP, Urgensi NDP, Posisi NDP, Kerangka permasalahan NDP, dan Kesimpulan.

Kemudian hingga pada Kongres VIII PMII di Bandung tahun 1985, pembahasan komisi mengenai NDP yang tak kelar-kelar mendesak kepengurusan PB PMII 1985-1988 untuk segera merampungkan rumusan NDP tersebut. Hingga akhirnya ditunjuk beberapa cabang untuk melengkapi dan menyusun rumusan NDP yang belum rampung. Dan terpilihah perwakilan dari cabang Surakarta untuk menggarap PR tersebut pada tahun 1986 yang diketuai oleh Nukbah El Mankhub.

Kongres IX PMII

Selama hampir 2 tahun, tim PC PMII Surakarta berjuang dalam merampungkan

kerangka bahan NDP dengan rutin mengadakan diskusi dan lokakarya yang juga bekerja sama dengan cabang Yogyakarta dan Semarang. Tim PC PMII Surakarta pun juga mewawancarai beberapa tokoh ulama dan kyai dalam merampungkan rumusan NDP ini sebelum akhirnya disahkan pada Kongres ke-IX PMII.

Setelah perjalanan panjang tim PC PMII Surakarta dalam merampungkan rumusan NDP, akhirnya hasil rumusan tersebut diserahkan ke tim PB PMII yang diketuai oleh M. Fajrul Falakh dalam menyusun rumusan tersebut. NDP akhirnya disahkan pada Kongres ke-IX PMII di Jakarta 14-19 September 1988. Yang dokumennya terdiri dari;

1. Pengertian
2. Kedudukan
3. Fungsi
4. Rumusan NDP, meliputi;
 - a) Tauhid
 - b) Hubungan manusia dengan Allah
 - c) Hubungan antar manusia

- d) Hubungan manusia dengan alam
5. Penutup

C. FUNGSI DAN KEDUDUKAN NDP

Seperti yang kita sadari bersama, proses perumusan NDP yang begitu panjang merupakan hal yang tak mudah untuk diselesaikan. NDP sendiri merupakan bentuk penyederhanaan dari berbagai ajaran dan nilai-nilai aswaja sebagai haluan organisasi. Yang dimana nilai-nilai tersebut masih berserakan dalam berbagai literatur kitab dan pikiran para ulama sendiri. Hingga tersusunlah NDP guna penyederhanaan nilai dan ajaran agar mudah dipahami oleh seluruh kader dan anggota PMII yang notabnya tidak semua dari kalangan santri.

Fungsi NDP

NDP sendiri bagi PMII mempunyai fungsi;

1. Kerangka Ideologis, yaitu NDP menjadi landasan berpikir guna peneguh tekad dan keyakinan anggota untuk bergerak dan berjuang mewujudkan cita-cita dan

tujuan organisasi melalui cara dan jalan yang sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing

2. Kerangka Aksi, yaitu NDP merupakan landasan etos gerak organisasi dan setiap anggota. Sebagai kerangka aksi, etos akan muncul dari proses aksi – refleksi yang dilakukan secara terus-menerus. Tahap memahami Nilai Dasar harus segera diikuti dengan ikhtiar untuk mewujudkan Nilai itu dalam gerak dan tindakan, kemudian setelah bergerak dan bertindak harus pula segera ditinjau apakah tindakan dan gerakan itu telah memenuhi atau mendekati Nilai Dasar.
3. Kerangka Refleksi, yaitu NDP merupakan ruang untuk melihat dan merenungkan kembali secara jernih setiap gerakan dan tindakan organisasi. Di dalam refleksi, gerakan dan tindakan organisasi dihadapkan untuk berdialog dengan rumusan-rumusan Nilai Dasar Pergerakan. Dialog ini sejatinya harus berlangsung terus-menerus, sehingga

butiran-butiran Nilai Dasar Pergerakan menjadi hidup dan menjiwai setiap gerak dan kegiatan organisasi. Merupakan kewajiban setiap anggota untuk senantiasa melakukan perenungan dan refleksi apakah tindakan dan kegiatannya telah mendekati Nilai Dasar Pergerakan.

Kedudukan NDP

NDP sendiri mempunyai kedudukan sebagai;

1. NDP menjadi rujukan utama setiap produk hukum dan kegiatan organisasi.
2. NDP menjadi sumber kekuatan ideal setiap kegiatan organisasi.
3. NDP menjadi pijakan argumentasi dan pengikat kebebasan berfikir, berbicara dan bertindak setiap anggota.

D. NILAI FILOSOFIS PILAR NDP

Tauhid

Mengesakan Allah SWT merupakan nilai paling asasi dalam sejarah agama samawi. Di

dalamnya telah terkandung sejak awal tentang keberadaan manusia, (*Q.S. Al-Ikhlās, Al-Mukmin:25, Al-Baqarah:130-131*).

PERTAMA, Allah adalah Esa dalam segala totalitas, dzat, sifat dan perbuatan-perbuatan-Nya. Allah adalah dzat yang fungsional. Allah Menciptakan, Memberi Petunjuk, Memerintah dan Memelihara alam semesta. Allah juga Menanamkan Pengetahuan, Membimbing dan Menolong manusia. Allah Maha Mengetahui, Maha Menolong, Maha Bijaksana, Hakim Maha Adil, Maha Tunggal, Maha Mendahului dan Maha Menerima segala bentuk Pujaan dan Penghambaan, (*Q.S. Al-Hasyr:22-24*).

KEDUA, keyakinan seperti itu merupakan keyakinan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari alam semesta, serta merupakan manifestasi kesadaran dan keyakinan kepada hal yang ghaib, (*Q.S. Al-Baqoroh:3, Muhammad:14-15, Al-Alaq:4, Al-Isro":7*).

KETIGA, oleh karena itu tauhid merupakan titik puncak, melandasi, memandu dan menjadi sasaran keimanan yang mencakup keyakinan dalam hati, penegasan lewat lisan dan perwujudan lewat perbuatan. Maka, konsekuensinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia harus mampu melarutkan dan menetaskan nilai-nilai tauhid dalam berbagai kehidupan serta tersosialisasikan hingga merambah sekelilingnya, (*Q.S. Al-Baqoroh:30, Al-A''raf:129, An-Nahl:62, Fathir:39*). Hal ini dibuktikan dengan pemisahan yang tegas antara hal-hal yang profan dan yang sakral. Selain atas Allah sebagai Dzat Yang Maha Kuasa, boleh dilakukan dekonstruksi dan desakralisasi atas segala hal. Sehingga tidak terjadi penghambaan pada hal-hal yang sifatnya profan, seperti jabatan, institusi, teks, orang dan seterusnya.

KEEMPAT, PMII memilih pendekatan berpikir Ahlussunnah wal-Jama'ah untuk memahami dan menghayati keyakinan Tauhid.

Hablumminallah (Hubungan Manusia dengan Allah)

Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan manusia sebaik-baik kejadian dan menganugerahkan kedudukan terhormat kepada manusia di hadapan ciptaanNya yang lain, (*Q.S. Al-Dzariat:56, Al-A'raf:179, Al-Qashash:27*).

Kedudukan seperti itu ditandai dengan pemberian daya pikir, kemampuan berkreasi dan kesadaran moral. Potensi itulah yang memungkinkan manusia memerankan fungsinya sebagai khalifah dan memenuhi posisinya sebagai Hamba Allah. Dalam kehidupan sebagai khalifah, manusia mengemban amanat berat yang oleh Allah ditawarkan kepada makhlukNya. Sebagai hamba Allah (*Q.S. Shad:82-83, Al-Hujurat:4*), manusia harus melaksanakan ketentuan-ketentuanNya. Untuk itu manusia dilengkapi dengan kesadaran moral yang selalu harus dirawat jika manusia tidak ingin terjatuh ke dalam kedudukan yang rendah, (*Q.S. Al-Imron:153, Hud:88*).

Dengan demikian, dalam kedudukan manusia sebagai ciptaan Allah, terdapat dua pola hubungan manusia dengan Allah, yaitu pola yang didasarkan pada kedudukan manusia sebagai Khalifah Allah dan sebagai Hamba Allah (*Q.S. Al-An'am:165, Yunus:14*).

Dengan demikian berarti diberikan penekanan kepada proses menjadi insan yang mengembangkan dua pola hubungan dengan Allah. Dengan menyadari arti niat dan ikhtiar, akan muncul manusia-manusia yang mempunyai kesadaran tinggi, kreatif, dan dinamis dalam hubungan dengan Allah. Sekaligus didukung dengan ketakwaan dan tidak pernah pongah kepada Allah, (*Q.S. Al-Imron:159*).

Hablumminannas (Hubungan Antar Manusia)

Setiap manusia memiliki kekurangan (*Q.S. At-Takatsur; Al-Humazah; AlMa'un; Az-Zumar:49, Al-Hajj:66*) dan kelebihan, ada yang menonjol pada diri seseorang tentang potensi kebaikannya (*Q.S. Al-Mu'minun:57-61*) tetapi ada pula yang terlalu menonjolkan potensi

kelemahannya. Karena kesadaran ini, manusia harus saling menolong, saling menghormati, bekerjasama, menasehati dan saling mengajak kepada kebenaran demi kebaikan bersama, (*Q.S. Ali Imran:103, AnNisa":36-39*).

Memang manusia harus menegakkan iman, taqwa dan amal sholeh guna mewujudkan kehidupan yang baik dan penuh rahmat di dunia. Di dalam kehidupan dunia itu, sesama manusia saling menghormati harkat dan martabat masing-masing, bersederajat, berlaku adil dan mengusahakan kebahagiaan bersama. Untuk itu diperlukan usaha bersama yang harus didahului dengan sikap keterbukaan, komunikasi dan dialog yang egaliter dan setara antar sesama. Semua usaha dan perjuangan ini harus terus menerus dilakukan sepanjang sejarah.

Melalui pandangan seperti ini pula kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dikembangkan. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan kerelaan dan kesepakatan untuk

bekerjasama serta berdampingan setara dan saling pengertian. Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita bersama yakni, hidup dalam kemajuan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Tolak ukur bernegara adalah keadilan, persamaan hukum serta adanya permusyawaratan.

Sedangkan hubungan antar muslim dan non muslim dilakukan guna membina kehidupan manusia dengan tanpa mengorbankan keyakinan terhadap universalitas dan kebenaran Islam sebagai ajaran kehidupan yang paripurna. Dengan tetap berpegang pada keyakinan ini. Dibina hubungan dan kerja sama secara damai dalam mencapai cita-cita bersama umat manusia, (*Q.S. Al-Kaafirun*). .

Hablumminalalam (Hubungan Manusia dengan Alam)

Alam juga menunjukkan tanda-tanda keberadaan, sifat dan perbuatan Allah, (*Q.S. Al-Ankabut:64, Al-jaatsiyah:3-5*). Nilai tauhid melingkupi nilai hubungan manusia dengan alam.

Sebagai ciptaan Allah, alam bekedudukan sederajat dengan manusia. Namun Allah menundukan alam bagi manusia (*Q.S. AlSyura:20, Yusuf:109, Al-Anam:32, Al-Baqoroh:29*) dan bukan sebaliknya. Jika sebaliknya yang terjadi maka manusia akan terjebak dalam penghambaan terhadap alam. Bukan penghambaan kepada Allah. Allah mendudukan manusia sebagai khalifah (*Q.S. Al-Baqoroh:30*).

Sudah seharusnya manusia menjadikan bumi maupun alam sebagai wahana dalam bertauhid dan menegaskan keberadaan dirinya (*Q.S. Al-Jaatsiyah:12-13, AlGhaasyiyah:17-26*), bukan menjadikannya sebagai obyek eksploitasi (*Q.S. ArRum:41*).

Perlakuan baik manusia terhadap alam dimaksudkan untuk memakmurkan kehidupan di dunia dan diarahkan untuk kebaikan akhirat. Di sini berlaku upaya berkelanjutan untuk mentransendensikan segala aspek kehidupan

manusia benar-benar fungsional dan beramal shaleh, (*Q.S. Al-Baqarah:62, AlA"ashr*).

KOPRI PMII

A. PENGERTIAN DAN ORIENTASI KOPRI

Kopri adalah kependekan dari Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, yang dimaksud dengan Korps sendiri adalah persatuan atau perkumpulan sekelompok orang dalam satu wadah tertentu di mana yang dimaksud dengan sekelompok itu adalah perempuan-perempuan yang mengikuti organisasi Kopri.

Kopri merupakan lembaga semi otonom PMII yang melalui lika-liku dalam pendiriannya hingga seperti sekarang. Berawal dari Departemen Keputrian PMII hingga terbentuklah Kopri yang didirikan pada 25 November 1967 di Semarang. Namun ternyata Kopri mengalami jatuh bangun hingga didirikan terakhir kalinya pada 29 September 2003, melalui hasil pertemuan Pokja Perempuan Kopri pada 26-29 September 2003.

Sebagai mahasiswa yang berbasiskan Mahasiswa dan Islam, maka corak pikir Kopri tidak dapat dilepaskan pada pemikiran

kemahasiswaan, Keislaman, dan Keindonesiaan. Kemahasiswaan dapat diartikan bahwa gerakan Kopri tidak lepas dari semangat dan pola pikir dari mahasiswa sebagai anggota Kopri yang memiliki karakteristik kritis terhadap berbagai macam persoalan dan selalu dibuktikan dalam bentuk eksyen-eksyen yang berapi-api.

Sedangkan keIslaman Kopri merupakan perwujudan dari pikiran Islam yang menganut faham *Ahlussunah Wal jamaah* sebagai ciri dari masyarakat dengan latar belakang NU dan rata-rata berasal dari pesantren.

Sebagai mahasiswa Indonesia Kopri memiliki pemahaman keindonesiaan sebagai corak pemikiran kebangsaan. Disini Kopri memandang Bangsa Indonesia sebagai tanah tumpah darah yang memiliki kekayaan budaya, adat istiadat dan norma-norma sebagai dasar dalam berbangsa dan bernegara.

Kopri sendiri dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan kader dan anggota putri PMII. Dalam rangka pemberdayaan, kaum

perempuan dipandang perlu wadah khusus guna peningkatan ideologisasi. Hal ini dikarenakan jika saja kita melihat kiprah perempuan dalam ranah publik jika disandingkan dengan laki-laki cenderung lemah. Akhirnya kaum perempuan butuh ruang khusus guna tempaan mental dan intelektual dalam menghadapi sosiologi tersebut.

B. SEJARAH DAN DINAMIKA

PERKEMBANGAN KOPRI

Awal mula ide Kopri

Embrio kelahiran Kopri PMII berawal dari Kongres III PMII yang dilaksanakan pada 7-11 Februari 1967 di Malang dan dihadiri sekitar 75 cabang PMII dari berbagai daerah. Pada Kongres ini dicetuskan beberapa ide mengenai pembentukan badan Kopri sebagai lembaga semi otonom yang menjadi ruang pemberdayaan anggota PMII putri. Hal ini merupakan lanjutan dari departemen keputrian sendiri yang sejak awal ada di tubuh PMII.

Perlu diketahui pada periode pertama setelah pembentukan yaitu tahun 1960 departemen

keputrian dikepalai oleh Mahmudah Nahrawi, tahun 1961-1967 dikepalai oleh Enny Suhaeni selama dua periode. Dan pada Kongres ke-III sebelum berdirinya Kopri dipilih Tien Hartini sebagai kepala departemen keputrian.

Sebelumnya PB PMII mengadakan Training Kursus Keputrian pada 16 Februari 1966 bersamaan dengan Mukernas I PMII di Jakarta dimana merupakan awal gagasan pembentukan badan otomom kopri sendiri muncul. Dalam Latihan Kursus Keputrian tersebut juga melahirkan Panca Norma Kopri, yang berisi tentang emansipasi, etika wanita islam, watak PMII putri dalam kesatuan dan totalitas berorganisasi, partisipasi PMII putri terhadap neven organisasi, dan partisipasi terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat.

Mukernas II PMII-Munas I Kopri

Akhirnya Kopri resmi terbentuk pada momen Mukernas II di Semarang pada 25 November 1967. Ketua umum PP Kopri periode pertama adalah Ismi Maryam dan bertempat di Jakarta

sebagai markas PP Kopri. Awal Kopri terbentuk, secara struktural merupakan badan otonom PMII.

Pada momen Mubes I PMII yang dilaksanakan di Garut pada 20-27 Januari 1969 bersamaan dengan latihan instruktur kepengurusan Kopri pusat dipindahkan ke Surabaya yang selanjutnya pengelolaanya diserahkan kepada PMII wilayah Jawa Timur.

Berjalanya waktu, Musyawarah Nasional Kopri yang pertama dilakukan bersamaan dengan Kongres IV PMII pada tanggal 25-30 April 1970 di Makasar. Ketua PP Kopri periode kedua ini adalah Adibah Hamid.

Vakum dan dibubarkanya Kopri

Sayang, kepengurusan Kopri tak berjalan lancar. Periode 1970-1973 yang diketuai oleh Adibah Hamid, PP Kopri dinilai vakum karena sama sekali tidak ada kegiatan keorganisasian yang berjalan dan dicap gagal..

Puncaknya pada Kongres ke-V PMII di Ciloto Jawa Barat pada 25-28 Desember 1973, pengurus PP Kopri tidak bisa memberikan laporan pertanggungjawaban bahkan pada saat itu tidak ada satupun anggota Kopri yang hadir di forum Kongres. Akhirnya dari hasil Kongres salah satunya mengeluarkan pernyataan Ciloto, yang meminta pengurus Kopri membuat Mubes khusus Kopri dengan jangka waktu limit 6 bulan pasca Kongres V.

Akhirnya dari keputusan tersebut juga, Kopri resmi dibubarkan. PB PMII sendiri kembali mengefektifkan bidang keputrian di strukturalnya dalam rangka pemberdayaan kader-kader putri.

Pembentukan kembali KOPRI

Setelah dibubarkanya Kopri, ternyata masih ada dorongan yang kuat terkhusus dari kader-kader putri PMII dalam membuat ruang khusus untuk mengkader. Akhirnya setelah penantian panjang, Kopri kembali dibentuk pada momen Kongres ke-IX PMII di Surabaya pada 14-19 September 1988. Ketua Kopri pada periode ini

adalah Khofifah. Ditahun yang sama pula, dirumuskan sistem kaderisasi bagi Kopri terdiri dari, kurikulum dan pelaksanaan Latihan Kader Kopri dan Latihan Pelatih Kader Kopri.

Pada 28 Oktober 1991 dirumuskan Nilai Kader Kopri (NKK) sebagai sarana kader Kopri dalam mengenal dan melihat dirinya sendiri atau sebagai upaya dalam mengenali jati diri kader Kopri.

Pembubaran KOPRI yang kedua kalinya

Namun sayang, Kopri mengalami pembubaran yang kedua kalinya. Kopri dibubarkan melalui voting pada Kongres ke-XIII di Medan tahun 2000 dengan ketua Kopri pada waktu itu adalah Luluk Nur Hamidah.

Permasalahan Kopri pada waktu itu begitu kompleks, tidak hanya mengenai progres dari Kopri saja. Namun, ternyata masih banyak paradigma ataupun pandangan mengenai Kopri yang belum jelas. Belum lagi kesenjangan dan

kesadaran gender yang masih minim di setiap level kepengurusan PMII.

Kopri dibentuk kembali

Mengalami stagnasi berkepanjangan yang membuat resah kader-kader putri PMII akhirnya mendesak agar dibentuk kembali wadah perempuan PMII. Akhirnya pada Kongres ke-XIV PMII di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur 16-21 April 2003, amanat Kongres menghimbau untuk segera mengadakan pertemuan Pokja Perempuan PMII. Akhirnya terlaksanalah pertemuan Pokja Perempuan PMII pada 26-29 September 2003 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta yang melahirkan Kopri kembali pada 29 September 2003. Pada periode tersebut, Kopri diketuai oleh Winarti.

Pada awalnya, Kopri yang terbentuk sebagai badan semi otonom berubah menjadi badan otonom pada Kongres ke-XV di Bogor Jawa Barat pada 26-31 Mei 2005. Akhirnya dipilih ketua PB Kopri pada saat itu adalah Ai' Maryati Salikhah. Perjalanan Kopri setelah itu ternyata

banyak pro kontra karena otoritas Kopri sendiri yang ditakutkan melenceng atau jauh dari PMII. Akhirnya pada Kongres ke-XVI pada Maret 2008 di Batam, Kopri kembali menjadi badan semi otonom PMII dengan ketua Kopri pada waktu itu adalah E'em Marhamah.

C. PENGKADERAN KOPRI PMII

Secara umum pengkaderan Kopri merupakan jenjang kaderisasi guna pengembangan pengetahuan berbasis gender di PMII. Kaderisasi Kopri juga terbagi atas kaderisasi formal, nonformal, dan informal. Kaderisasi formal kopri terdiri dari:

1. Sekolah Islam Gender (SIG), SIG Kopri merupakan jenjang pengkaderan formal awal Kopri dalam memberikan ideologisasi gender dan keislaman berdasar basis gender. SIG dapat dilaksanakan oleh Kopri Rayon maupun Kopri Komisariat pasca MAPABA.
2. Sekolah Kader Kopri (SKK), merupakan kaderisasi Kopri setelah SIG yang

memberikan pemahaman lebih inklusif terkait gender dan guna melahirkan kader Kopri yang matang mengenai ideologisasi Kopri. SKKN bisa diselenggarakan oleh Pengurus Cabang maupun Pengurus Koordinator Cabang.

3. Sekolah Kader Kopri Nasional (SKKN), merupakan jenjang pengkaderan formal terakhir Kopri yang diselenggarakan oleh PB PMII. SKKN berorientasi pada pemahaman universal gender dalam orientasi pengembangan SDM, pembangunan, politik dan sosial di ruang publik.

ASWAJA

A. HISTORIS MUNCULNYA ASWAJA

Pengertian Aswaja

Secara etimologi, Aswaja berasal dari bahasa Arab “*Ahl*” artinya keluarga, “*Al Sunnah*” berarti metode, kebiasaan, perjalanan hidup, atau perilaku, baik yang terpuji ataupun yang tercela, dan “*Al-jamaah*” yang berarti sekumpulan. Secara definisi *Ahlussunah Wal jamaah* berarti orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW baik di dalam *syariat* (hukum Islam) maupun akidah dan *tasawuf*.

Secara menurut pengertian istilah (terminologi) *al-sunnah*, berarti penganut sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikuti apa-apa yang datang dari Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan. Sedangkan *al-jama'ah* berarti penganut *i'tiqad* para sahabat Nabi, yakni apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah pada masa khulafaur al-rashidin (Abu Bakr al-Siddiq, Umar, Ustman, dan Ali). Jadi, yang dimaksud dengan Aswaja adalah

kaum yang mengikuti amaliah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

Menurut KH. M. Hasyim Asy'ari, "*Ahlussunnah Wal Jamaah* adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Secara spesifik, *Ahlussunnah Wal Jama'ah* yang berkembang di Jawa adalah mereka yang dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i, dalam akidah mengikuti Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, dan dalam tasawuf mengikuti Imam al-Ghazali dan Imam Abu al-Hasan al-Syadzili."

Dengan demikian yang dimaksud dengan Aswaja adalah kaum yang konsisten mengikuti amaliah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, tidak mendistorsi ajaran Nabi Muhammad SAW dan tidak mendiskreditkan sebagian sahabat atau seluruh sahabat Nabi.

Secara substantif, *Ahlus sunnah wal Jama'ah* itu meliputi tiga aspek Islam, yakni aspek akidah, fikih dan akhlak. Meskipun diskursus para ulama

sering hanya membicarakan aspek akidah dan syari'ah (fiqh), hal itu bukan berarti tidak ada aspek akhlak. Menurut pandangan ini, pengalaman (*practice*) dari dua aspek (yang disebut pertama) itu mengandung aspek akhlak atau tashawuf.

Kilas Sejarah Aswaja

Pada hakikatnya, *Ahlussunnah wal Jama'ah*, adalah ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Berawal ketika Rasulullah SAW menerangkan bahwa umatnya akan tergolong menjadi 73 golongan, beliau menegaskan bahwa yang benar dan selamat dari sekian banyak golongan itu hanyalah *Ahlussunnah wa Jamaah*. Perkataan Nabi Muhamad itulah yang menjadi cikal bakal munculnya teologi Aswaja nantinya.

Aswaja juga disebut lahir karena sebagai respon atas terbaginya umat islam menjadi berbagai golongan. Hal ini berawal dari konflik yang terjadi pada masa pemerintahan sahabat Ali

bin Abi Thalib menunjukkan berbagai gejala aliran pemikiran islam. dari mulai pertikaian kaum Ali dengan Muawiyah bin Abu Sofyan.

Perebutan kekuasaan pada masa itu menyebabkan perang yang tak terhindarkan. Dari perang tersebut kaum Muawiyah mengalami kekalahan yang tidak diterima, dan akhirnya timbulah kesepakatan (*arbitase*) antara kedua kelompok. Namun dari hasil perjanjian, kelompok Ali terbagi menjadi dua, yaitu *Syiah* (kelompok yang mengikuti Ali) dan *Khawarij* (keluar dari golongan Ali), yaitu kelompok yang menilai kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak sah karena tidak menggunakan hukum Allah atau Al-Qur'an sehingga mereka memutuskan *Khawarij* (*Kharaja*: keluar).

Berawal dari situ, akhirnya muncul berbagai kelompok pemikiran islam baru dalam merspons hal tersebut, seperti *Jabariyah* yang lahir dalam rangka *melegitimasi* kekuasaan Muawiyah menyatakan bahwa manusia tidak punya kekuasaan untuk berkehendak. Inti dari aliran

Jabariyah, semua yang dilakukan oleh manusia sudah dikehendaki oleh Allah. Termasuk ketika Muawiyah dapat mengambil kekuasaan dari tangan Ali itu juga kehendak Allah.

Setelah itu selama masa pemerintahan Bani Umayyah muncul aliran bernama *Qodariyah* yang diusung oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib (cucu Ali bin Abi Thalib). Aliran ini mengajarkan sebaliknya dari aliran *Jabariyah*. Bahwa ketika manusia berkehendak, Allah tidak ikut campur, maka manusia harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Ketika masa Bani Umayyah paham ini hanya sebagai kritik atas paham *Jabariyah*. Namun ketika memasuki pemerintahan Bani Abasiyah, paham *Qadariyah* dijadikan spirit pembangunan. Kemudian turunan dari paham ini dengan sedikit modifikasi mengatasnamakan paham *Mu'tazilah*.

Pada akhirnya lahirlah ulama bernama Abu Hasan al Asyari. Ia sebelumnya pengikut *Mu'tazilah* setelah itu keluar. Abu Hasan menyatakan tidak mengikuti kedua kubu ekstrem

dan berdiri di tengah-tengah. Ia memproklamirkan paham dimana rasulullah dan sahabat berada di dalamnya, dan menyebut paham dengan sebutan *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Titik tekan pada paham ini yakni manusia berkehendak tetapi kehendak itu diketahui Allah. Manusia mempunyai kehendak tapi kehendak itu dibatasi dengan takdir Allah.

Imam Abu Hasan al-Asy'ari (lahir di Bashrah, 260 H / 873 M, dan wafat di Baghdad, 324 H / 935 M) ialah seorang ahli fiqh terkenal, pemuka teolog Islam pada masanya. Menurut catatan sejarah, Abu Hasan al-Asy'ari adalah murid dari ayah tirinya yakni Syaikh Abu Ali Muhammad bin Abdil Wahab al-Juba,I (seorang ulama besar *Mu'tazilah*), kemudian Abu Hasan al-Asy'ari keluar dari paham gurunya itu karena menurutnya banyak keyakinan yang tidak benar. Kemudian beliau membangun paham sendiri yaitu *Ahlussunnah wal Jama'ah*.

Seluruh ajaran *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang disusun oleh Abu Hasan al-Asy'ari,

dibukukan oleh beliau diantaranya terdapat dalam kitab yang beliau susun seperti : *Al-Ibanah fi Ushuliddiniyyah*, *Maqalatul Islamiyyin*, *Al-Mujaz*, dan lain-lain.

B. PAHAM ASWAJA

Dalil dan rujukan

Jika diurut, sebenarnya paham Aswaja merupakan ajaran yang dibawakan oleh Nabi sendiri, namun pada saat masa Nabi Muhammad paham aswaja belum kita kenal seperti namanya sekarang. Hal ini diperkuat dengan hadist.

فالسنة ما سنه رسول الله ص م والجماعة ما اتفق عليه أصحاب رسول الله ص م في خلافة الأئمة
أربعة الخلفاء الراشدين المهديين رحمة الله عليهم
أجمعين

Artinya: "Al Sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW (meliputi ucapan, perilaku, serta ketetapan beliau) sedangkan Al jama'ah disini adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para

sahabat Nabi SAW pada masa Khulafaur Rasyidin yang empat, yang telah diberi hidayah, (mudah mudahan Allah memberi Rahmat kepada mereka semua.”) (Al ghunyah Li Thalibi Thariq al-haqq,juz I, hal.80.)

Lebih jelas lagi dikatakan oleh Hadratussyaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari menyebutkan dalam kitabnya Ziyadat ta'liqat hal 23-24 sebagai berikut:

أما اهل السنة فهم أهل التفسير والحديث والفقہ
فإنهم المهتدون المتمسكون بسنة النبي ص م
والخلفاء بعده الراشدين وهم الطائفة الناجية قالوا
وقد اجتمعت اليوم في مذاهب أربعة الحنفيون
والشافعيون والمالكيون والحنبليون

Artinya: "Adapun Ahlussunah wal jama'ah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis dan ahli fiqh. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan Sunnah nabi Saw dan Sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya, mereka adalah kelompok yang selamat, (Al Firqah Al najiyah,)

Mereka mengatakan, bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam madzhab empat, yaitu pengikut madzhab Hanafi Syafi'i, Maliki dan Hambali."

Hadist diatas menunjukkan bahwasanya paham *Ahlussunah Wal Jama'ah* merupakan ajaran yang sebenarnya ada sejak kepemimpinan Nabi Muhammad berlangsung. Yang akhirnya sepeninggalan Baginda Rasullullah SAW, paham tersebut menjadi suatu golongan kaum tertentu karena terpecah banyaknya ajaran islam setelah Rasullullah wafat.

Sedangkan menurut hadist riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim menyampaikan sabda Nabi Muhammmad saw berbunyi:

افتترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة،
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة،
وستتفرق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها
في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟

قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض الروايات: هي الجماعة

Artinya, "Umat Yahudi menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok. Umat ini (Islam) akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan (yang selamat). Nabi ditanya, "Siapa dia ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Yaitu golongan yang seperti aku dan para sahabatku." Dalam sebagian riwayat, "Dia adalah jamaah."

Dari hadis di atas lahirlah istilah *ahlussunnah wal jamaah*. Keutamaan *ahlussunnah wal jamaah* menurut hadits tersebut yaitu menjadi satu-satunya golongan yang selamat alias tidak berada di neraka seperti kelompok-kelompok lain.

Menurut KH. M. Hasyim Asy'ari, *Ahlussunnah Wal Jamaah* adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Secara spesifik, *Ahlussunnah Wal Jama'ah* yang berkembang di Jawa adalah

mereka yang dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i, dalam akidah mengikuti Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, dan dalam tasawuf mengikuti Imam al-Ghazali dan Imam Abu al-Hasan al-Syadzili.

Dalam prakteknya, golongan Aswaja selain merujuk pada Imam-Imam diatas, landasan pada Al-Quran dan hadist merupakan pegangan yang amat dijunjung pengikut golongan ini. Dan pada hal-hal yang belum jelas syariat atau hukumnya ulama dan pengikut Aswaja menggunakan *Ijma'* dan *Qiyas* dengan cara *Ijtihad* ulama.

Pilar Aswaja

Sebagai pembeda dengan yang lain, ada 4 ciri aswaja, yakni 4 sikap yang selalu diajarkan oleh rasulullah SAW, dan para sahabatnya. Yaitu:

1. *Al- Tawasuth*

Sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kanan ataupun kiri, hal ini di terangkan dari firman Allah SWT.

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على
الناس

Mengutip maqolah sayyidina Ali ibn abi thalib RA. ‘ *Kanan dan kiri itu menyesatkan, sedang jalan tengah adalah jalan yang benar.* ’

Tawassuth (Moderat) ialah sebuah sikap tengah yang tidak cenderung ke kanan atau ke kiri. Sikap ini didasarkan pada firman Allah SWT: “*dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.*” (Q.S Al-Baqarah: 143). Hal ini juga sesuai dengan dengan sabda Nabi Muhammad Saw bahwa *Khairul Umur Awsathuha* (Paling baiknya sesuatu adalah pertengahannya).

Dalam implementasinya, Al-Asyari dan Al-Maturidi hadir sebagai dua pemikir yang Moderat dalam bidang Akidah. Di satu sisi mereka berusaha untuk menghindari pemikiran Mu'tazilah yang terlalu rasional dan memuja

kebebasan berpikir sehingga menomorduakan al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi disisi lain, keduanya tidak sepakat dengan golongan salafi (Ibnu Taimiyah) yang sama sekali tidak member tempat bagi akal dan memaknai Al-Qur'an dan As-Sunnah secara tekstual. Mereka berusaha menggabungkan dua pendekatan itu dan kemudian melahirkan konsep teologi yang saling melengkapi.

Mazhab Fiqih yang empat menerapkan pemikiran yang moderat dalam mengambil ijtihad hukumnya. Dengan cirri khas masing-masing membangun konsep fikih Islam yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun pemahamannya tidak terjebak kepada fikih yang terlalu bersandar kepada tradisi ataupun kepada rasionalitas akal belaka.

Dalam bidang tasawuf, Imam Al-Junaid Al-Baghdady tampil dengan pemikiran tasawuf yang berusaha mencari sinergitas antara kelompok falsafi dengan konservatif. Beliau berhasil menghadirkan konsep tasawuf suni yang menjadikan Taqwa (Syari'ah) sebagai jalan utama menuju Haqiqah. Dengan demikian, beliau

berhasil mengangkat citra Tasawuf yang pada masa itu dianggap sebagai ajaran sesat sebab terlalu menyandarkan diri kepada filsafat Yunani dan tidak lagi mematuhi rambu-rambu syari'ah, seperti ajaran Al-Hallaj.

Dan terakhir muncul Al-Ghazali yang mempertemukan antara konsep-konsep filosofis dengan al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan terlebih dahulu mementahkan teori-teori filsafat yang menurutnya menyimpang dari ajaran Islam seperti Ikhwan al-Shafa. Bukan filsafat yang ditolak oleh Al-Ghazali, melainkan silogisme-silogisme filosofis yang bertentangan dengan Al-Qur'an.

Dalam konteks kekinian, metodologi berfikir moderat, harus kita maknai sebagai tidak mengikuti nalar kapitalisme-liberal disatu sisi dan nalar sosialisme disisi lain. Kita harus memiliki cara pandang yang otentik tentang realitas yang selalu berinteraksi dalam tradisi. Pemaknaannya ada dalam paradigam yang dipakai oleh PMII yaitu Paradigma Kritis transformatif dan bisa berkembang menjadi Paradigma Kritis Progresif.

Sikap moderat juga ditampilkan oleh sikap K.H. A. Mutamakkin, yang oleh Gus Dur disebut mengutamakan pandangan alternative terhadap kezaliman penguasa. Beliau tidak memberikan perlawanan secara terbuka, tetapi juga tidak membenarkannya.

2. At-tawazun

Seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil 'aqli dan naqli.

Al Hadid ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: “Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan)”

Tawazun berarti seimbang dalam pola hubungan atau relasi, baik yang bersifat antar

individu, antar struktur sosial, antar negara dan rakyatnya, maupun antara manusia dengan alam. Keseimbangan disini adalah bentuk hubungan yang tidak berat sebelah, tidak menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Tetapi, masing-masing pihak mampu menempatkan dirinya sesuai dengan fungsinya tanpa mengganggu fungsi dari pihak yang lainnya. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya kedinamisan hidup.

Dalam ranah sosial, yang ditekankan adalah egalitarianism (Persamaan derajat) seluruh umat manusia. Tidak ada yang merasa lebih dari yang lain, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Tidak ada eksploitasi dan dominasi seseorang kepada orang lain, termasuk laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Maka kita lihat sejarah nabi dan sahabatnya dengan tegas menolak dan berusaha menghapus perbudakan. Begitu juga, sikap NU yang tegas menentang penjajahan dan Kolonialisme terhadap bangsa Indonesia.

Dalam wilayah politik, tawazun meniscayakan keseimbangan antara posisi

Negara (penguasa) dan rakyat. Penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang, menutup kran demokrasi dan menindas rakyatnya. Sedangkan rakyat harus selalu mematuhi segala peraturan yang ditujukan untuk kepentingan bersama, tetapi juga senantiasa mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kita lihat sikap Ahmad bin Hanbal kepada Al-Makmun yang menindas Ulama yang menolak doktrin Mu'tazilah. Dia membangun basis perlawanan kerakyatan untuk menolak setiap bentuk pemaksaan negara, walaupun dia dan para ulama yang lain harus harus menahan penderitaan dan hukuman yang menyakitkan. Namun, kita juga bisa melihat contoh lain sikap Al-Ghazali terhadap pemimpin yang adil bernama Nizam Al-Muluk. Dia ikut berperan aktif dalam mendukung setiap program pemerintahan, member masukan atau kritik dan hubungan yang mesra antara ulama dan umara pun tercipta.

Kemudian dalam wilayah ekonomi, yang meniscayakan pembangunan sistem ekonomi yang seimbang antara posisi negara, pasar dan masyarakat. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz

mampu membangun ekonomi Islam yang kokoh dengan menyeimbangkan fungsi negara (*baitul mal*) sebagai pengatur sirkulasi keuangan dan pendistribusian zakat; Mewajibkan setiap pengusaha, pedagang dan pendistribusian jasa (pasar) untuk mengeluarkan zakat sebagai kontrol terhadap kekayaan individu dan melarang setiap bentuk monopoli yang dalam bahasa Karl Marx disebut kapitalis. Sehingga dalam kurun waktu tiga tahun saja telah terbangun struktur ekonomi yang stabil dan kesejahteraan hidup terjamin.

Dalam wilayah ekologi, tawazun meniscayakan pemanfaatan alam yang tidak eksploitatif dan merusak lingkungan. Tawazun sebagai pola relasi dimaknai sebagai usaha mewujudkan egalitarianism dalam ranah sosial, tidak ada kesenjangan berlebih antar manusia, mengembalikan fungsi negara dan memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya.

3. Tasamuh (Toleransi),

Sebuah prinsip yang fleksibelitas dalam menerima perbedaan dengan membangun sikap

keterbukaan dan toleransi. Hal ini lebih di ilhami dengan makna ‘lakum dinukum waliyadin dan walana a’maluna walakum a’malukum

Allah berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 10,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Tasamuh adalah sikap menghormati orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Tasamuh mengarah kepada sikap toleransi dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa, serta agama.

4. Al-I'tidal

Atau keadilan yaitu konsep tentang adanya proposionalitas yang telah lama menjadi metode untuk berfikir ala aswaja. Dalam alqur'an Allah SWT berfirman

QS Al maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰعْدِلُوا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Yang dimaksud dari Ta'adul atau adil adalah pola integral dari Tawassuth, Tasamuh dan Tawazun. Keadilan inilah yang merupakan ajaran

Universal Aswaja. Setiap pemikiran, sikap dan relasi harus selalu diselaraskan dengan nilai keadilan ini. Pemaknaan yang dimaksud disini adalah keadilan sosial. Yaitu nilai kebenaran yang mengatur totalitas kehidupan politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan sebagainya. Sejarah membuktikan, bagaimana Nabi Muhammad SAW mampu mewujudkannya dalam masyarakat madinah. Begitu juga Umar bin Khattab yang telah meletakkan pondasi bagi peradaban Islam yang Agung.

Contoh implementasi Aswaja sebagai Manhaj al Harokah

1) Akidah.

- a) Keseimbangan dalam penggunaan dalil 'aqli dan dalil naqli.
- b) Memurnikan akidah dari pengaruh luar Islam.
- c) Tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, bid'ah apalagi kafir.

2) Syari'at

- a) Berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- b) Akal baru dapat digunakan pada masalah yang tidak ada nash yang jelas (*sharih/qotht'i*).
- c) Dapat menerima perbedaan pendapat dalam menilai masalah yang memiliki dalil yang multi-interpretatif (*zhanni*).

3) Tashawwuf/Akhlak

- a) Tidak mencegah, bahkan menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam, selama menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- b) Mencegah sikap berlebihan (*ghuluw*) dalam menilai sesuatu.
- c) Berpedoman kepada Akhlak yang luhur. Misalnya sikap *syaja'ah* atau berani (antara penakut dan ngawur atau sembrono), sikap *tawadhu'* (antara

sombong dan rendah diri) dan sikap dermawan (antara kikir dan boros).

4) Pergaulan antar golongan

- a) Mengakui watak manusia yang senang berkumpul dan berkelompok berdasarkan unsur pengikatnya masing-masing.
- b) Mengembangkan toleransi kepada kelompok yang berbeda.
- c) Pergaulan antar golongan harus atas dasar saling menghormati dan menghargai.
- d) Bersikap tegas kepada pihak yang nyata-nyata memusuhi agama Islam.

5) Kehidupan bernegara

- a) NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) harus tetap dipertahankan karena merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa.
- b) Selalu taat dan patuh kepada pemerintah dengan semua aturan yang dibuat, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

- c) Tidak melakukan pemberontakan atau kudeta kepada pemerintah yang sah.
 - d) Kalau terjadi penyimpangan dalam pemerintahan, maka mengingatkannya dengan cara yang baik.
- 6) Kebudayaan
- a) Kebudayaan harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar. Dinilai dan diukur dengan norma dan hukum agama.
 - b) Kebudayaan yang baik dan tidak bertentangan dengan agama dapat diterima, dari manapun datangnya. Sedangkan yang tidak baik harus ditinggal.
 - c) Dapat menerima budaya baru yang baik dan melestarikan budaya lama yang masih relevan (*al-muhafazhatu 'alal qadimis shalih wal akhdu bil jadidil ashlah*).
- 7) Dakwah
- a) Berdakwah bukan untuk menghukum atau memberikan vonis bersalah, tetapi

mengajak masyarakat menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

- b)* Berdakwah dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang jelas.
- c)* Dakwah dilakukan dengan petunjuk yang baik dan keterangan yang jelas, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sasaran dakwah.

SEBUAH REFLEKSI

A. RELEVANSI KADERISASI

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia merupakan organisasi ekstra mahasiswa berbasis pengkaderan. Biasanya PMII tumbuh subur di dalam kampus kampus islam terkhusus yang berlatar belakang NU, ya karena memang organisasi ini mempunyai background NU. Hubungan dengan NU pun sangat berpengaruh dari masa awal pendirian hingga sekarang.

Organisasi yang lahir dari pemikiran para mantan aktivis HMI (yang juga kader NU) ini mengawali perjalanan yang cukup sulit. Dari sulitnya mendapat ijin dari Ketum PBNU pada masa itu hingga perbedaan argumen dengan kawan seperjuangan sendiri yaitu IPNU. Namun akhirnya PMII resmi berdiri pada 17 April 1960 .

Mengingat PMII sebgai organisasi kaderisasi, tentu PMII punya sistem pengelolaan pengkaderan dalam memberdayakan anggotanya.

Kilas balik pada awal didirikannya PMII, bahwa organisasi tersebut didirikan bukan hanya atas idealisme mahasiswa saja, namun sebagai kepentingan politik. Tentunya hal ini bukan asumsi yang tak berdasar. Dalam prakteknya saat itu PMII sangat dekat dengan NU yang menjadi partai politik. Kaderisasi yang berjalan berorientasi untuk kepentingan politik NU sendiri. Namun, seiring bertambahnya usia PMII, organisasi ini akhirnya memutuskan untuk Independen, memisahkan diri dari NU. Hal ini berarti PMII tak lagi berurusan dengan politik NU.

Pola pengkaderan PMII

Pasca Independensinya PMII dengan NU tentunya memunculkan PR baru untuk bagaimana PMII bisa berkembang tanpa lagi ada *support system* dari induknya. Artinya perumusan konsep baru dalam sistem pengembangan kader PMII tanpa bergantung dengan NU sangat perlu dilaksanakan.

Walaupun secara struktural terlepas dengan NU, PMII tetap mengadopsi nilai-nilai Islam Aswaja yang juga digunakan NU sebagai metode berfikirnya dan landasan bergerak. Hal ini dibuktikan dari berbagai pendekatan dan kultur yang dilahirkan PMII yang beda jauh dengan NU yang fleksibel dan merujuk pada *ijtihad* dalam proses penyelesaian masalahnya.

Berjalanya waktu PMII merumuskan sistem pengkaderan yang dibagi menjadi tiga yaitu pengkaderan formal, nonformal, dan pengkaderan informal. Dari ketiga pola tersebut mempunyai metode dan karakteristik yang berbeda disetiap pelaksanaannya. Seperti pengkaderan formal yang dibuat berjenjang dari MAPABA, PKD, PKL, hingga PKN. Pun perjenjang tersebut mempunyai orientasi dan metode yang berbeda. Pengkaderan formal ini merupakan pola kaderisasi yang berfokus pada peningkatan ideologis kader dan anggota dengan memberikan doktrin nilai-nilai yang dipegang PMII.

Penguatan ideologisasi merupakan hal dasar yang harus dilaksanakan anggota dan kader PMII. Mau bagaimanapun atau sepintar apapun kader berbicara mengenai perubahan jika tak didasari dengan ideologisasi PMII, hal yang ditakutkan adalah *miss orientation* nya gerakan tersebut terhadap nilai-nilai PMII. Ini berarti bagaimana cara ataupun metode yang digunakan dalam pelaksanaan kaderisasi formal adalah bagaimana seharusnya nilai-nilai tersebut mampu ter-*reduksi* dalam pikiran setiap anggota maupun kader.

Kemudian pengkaderan non formal yang lebih bersifat fleksibel. Pengkaderan ini memfokuskan pada keminatan dan *basic skill* yang dimiliki anggota dan kader PMII. Tentunya ini tak kalah penting dari proses ideologisasi. Mau membawa apa kita kalau tak punya *skill* yang dibutuhkan masyarakat. Karena perlu kita pahami, jika ideologisasi adalah dasar, maka *basic skill* adalah bekal dalam menuju perubahan.

Berbicara pengembangan kader dalam menjawab tantangan zaman tentunya pengkaderan jenis ini sangat diperlukan sebagai senjata dalam bersaing di ruang publik. Pemfokusan pada bidang tertentu merupakan langkah strategis PMII dalam menyebarluaskan nilai-nilai organisasi di berbagai bidang. Karena yang sudah jelas, masyarakat awam tak butuh seberapa pintar kita berbicara mengenai organisasi PMII, namun bisa apa kita sebagai kader PMII.

Melalui pelatihan-pelatihan pada bidang tertentu, tiap anggota ataupun kader PMII diharapkan mampu mempraktekan ilmu tersebut di ruang publik guna kebutuhan di masyarakat. Mau sampai kapan PMII hanya berfokus pada masalah kaderisasi internal, ataupun masalah politik kampus?. Sedangkan pada saat yang sama juga sebenarnya kita dibutuhkan di berbagai lini kehidupan masyarakat sebagai *'social of control'*.

Selanjutnya, yang tak kalah penting dalam proses pengkaderan adalah kaderisasi informal. Merupakan pengkaderan yang sangat bersifat fleksibel menyesuaikan kondisi dan keadaan sosiologis anggota ataupun kader PMII. Pengkaderan ini berfokus pada apa kultur ataupun kebiasaan dari anggota PMII sebagai jalan pintas dalam memberikan pemahaman ideologisasi.

Seiring bergantinya tahun, kondisi dan kultur dari mahasiswa mengalami perubahan, entah perubahan kecil ataupun perubahan yang drastis sekalipun. Hal ini tak bisa kita pandang sebelah mata, perlunya perumusan pendekatan sosiologis dan psikologis perlu dibuat guna tiap-tiap anggota PMII yang dikader mampu merasakan ayoman dan pengaalan dari kepengurusan lembaga PMII yang berwenang. Merupakan hal penting bagi tiap pengurus agar mampu membaca kondisi sosial dan mampu memposisikan diri mereka di waktu ataupun tempat yang mampu mempengaruhi anggota agar dapat mempunyai kesan baik terhadap PMII.

Pendekatan informal kedengarannya enteng, namun sulit jika dilaksanakan. Ya, karena kondisi tiap anggota dan kader yang berbeda. Hal ini merupakan problem sendiri, artinya perlunya pemetaan yang tepat dan matang bagi pengurus dalam mengkader anggotanya yang perlu dipandang penting, karena banyaknya anggota kepengurusan belum tentu mampu mengkader anggotanya sesuai target. Pada intinya pengkaderan jenis ini memerlukan analisa yang tajam dalam menyesuaikan apa yang diperlukan ataupun disukai anggota sebagai jalan pintas dalam memberikan pemahama ideologisasi.

Pada akhirnya, pertanyaan yang saya pribadi belum bisa menjawab secara akurat adalah, sudah benarkah sistem pengkaderan yang selama ini dibuat? Entah kaderisasi formal, informal, lebih lagi informal. Atau fokus apakah yang digunakan PMII dalam membangun kader ideologis yang loyal dan paham akan organisasinya? Lebih lagi, sudah seberapa besar kontribusi PMII bagi masyarakat, entah di tingkat

PB, PKC, PC, ataupun Komisariat?. Sepertinya hal tersebut perlu kita refleksikan lebih dalam.

B. INTERNALISASI NILAI SEBAGAI KADER INSAN ULUL ALBAB

PMII sebagai nilai

Jika ditanyakan kemana PMII seharusnya berjalan, tentu secara tegas penulis menjawab bahwa ajaran Ahlussunah Wal Jamaah serta nilai fundamental PMII seperti yang tertuang pada produk hukum dan NDP PMII menjadi dasar pemikiran dan langkah gerak kedepan. Ya, memang seharusnya demikianlah PMII berjalan. Nilai-nilai tersebut merupakan ruh organisasi yang seharusnya ada dalam sistem pengkaderan lembaga-lembaga PMII dari tingkat Pengurus Rayon sampai Pengurus Besar.

Walaupun secara historis PMII berdiri karena realitas politik, namun tak bisa dikesampingkan bahwa PMII merupakan organisasi kemahasiswaan berbasis kaderisasi yang menggunakan nilai-nilai islam Ahlussunah Wal Jamaah dalam sistem pengajarannya. Hal inilah

yang seharusnya menjadi pegangan kader-kader PMII dalam menjalankan roda kepemimpinan. Bahkan dari nilai-nilai Aswaja pun diturunkan lagi menjadi Nilai Dasar Pergerakan PMII yang menjadi konstruksi sistem organisasi.

Seharusnya kader-kader PMII mampu melihat nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai organisasi yang sebagai pijakan, dasar dan pedoman dalam menjalankan organisasi menuju harapan dan cita-cita PMII sendiri seperti yang tercantum pada tujuan organisasi PMII. Nilai-nilai inilah yang menjadi batasan dan menjadi alat analisis dalam membangun sebuah gerakan. Gerakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, penuntasan bias sosial, serta gerakan yang menumbuhkan semangat revolusioner dalam membangun bangsa yang berkemajuan.

PMII bukanlah sebuah identitas tertentu, PMII adalah nilai itu sendiri. Organisasi yang mampu merepresentasikan nilai Ahlussunah Wal Jamaah, organisasi yang berjalan atas dasar nilai dan tujuan, bukan kepentingan kelompok apalagi

individual tertentu. Oleh sebab itu, jika sudah menjadi kader, merasalah yang kita perjuangkan adalah nilai dari organisasi PMII bukan malahan fanatisme yang radikal namun tak paham akan nilai perjuangan organisasi yang seharusnya diwujudkan.

PMII dalam bingkai sosial

PMII sebagai organisasi kaderisasi harusnya membangun sistem pengajaran yang mampu memberikan manfaat dan pengaruh baik kepada orang lain, yaitu kepada elemen kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui doktrin nilai yang ada dalam PMII, gerakan yang terbangun harusnya mampu merepresentasikan nilai-nilai tersebut. Nilai kebaikan yang berdasar doktrin fundamental organisasi.

Pada realitanya, kader-kader PMII dengan berbagai kapasitas yang ada dirasa belum maksimal memberikan pengaruh kepada masyarakat sosial. Berkaca pada kepemimpinan lembaga PB PMII sendiri yang ternyata belum

banyak berkontribusi kepada masyarakat luas, yang malahan terjadi banyak problem internal. Dari contoh hal tersebut, menurut penulis bahwasanya pengaruh pola pengajaran yang dilakukan di tingkat Rayon mampu mempengaruhi perkembangan arah gerak dan pola pikir kader sendiri.

Ruang Rayon merupakan wadah yang paling ideal bagi kader PMII untuk berkembang dan belajar. Dengan umur yang masih muda dan semangat yang masih tinggi idealnya kita yang berada di tingkat Rayon mempunyai semangat juang yang lebih besar bagi kepentingan orang banyak, karena sangat minin pada taraf ini untuk memperjuangkan kepentingan personal. Namun hal ini harusnya ditunjang dengan sistem pengkaderan yang mampu menerangan, pola pengkaderan yang menambah ideologisasi menjadi doktrin yang tak terbantahkan.

Hendaknya, kader PMII tak sepatutnya berbicara untuk kepentingan personal. Sistem kaderisasi yang dibangun harus mampu

menembus dinding sosial, menjamah elemen masyarakat kecil di ruang sosial ekonomi dan pejabat pemerintahan dalam membangun politik kemasyarakatan yang berkepentingan untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemetaan dan pemanfaatan ruang strategis dalam menghadapi tantangan zaman

“Ideologisasi yang matang mampu menciptakan pergerakan dalam membawa perubahan ke arah yang lebih cerah”. Tentunya pernyataan tersebut sangatlah benar, karena dalam menciptakan perubahan tentu harus punya bekal yang matang. Mulai dari pengetahuan keorganisasian dan kapasitas nalar pikir dalam memecahkan atau menganalisa masalah. Hal ini didasari karena seiring bertumbuhnya organisasi, realitas sosial yang dihadapipun ikut tumbuh dan berubah.

Dewasa ini, perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang tak terbendung mengharuskan masyarakat untuk ikut berkembang. Tak

terkecuali organisasi, sebagai salah satu komponen dalam masyarakat. Terkhusus organisasi PMII yang kita bicarakan sekarang. Ya, PMII harus berkembang, harus bertransformasi, harus beradaptasi agar mampu bertahan dan bisa menjamah ke seluruh lapisan elemen masyarakat.

Perubahan realitas sosial dari satu masa ke masa selanjutnya mengharuskan PMII untuk adaptif. PMII harus terus hidup dengan segala realitas sosial yang dialami. Berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat khususnya pada aspek sosial mengharuskan PMII untuk ikut berbenah dan menyiapkan perubahan sistem kaderisasi untuk melahirkan kader pemikir, inovatif, dan revolusioner.

Sistem pengkaderan harus dibuat dengan melihat perkembangan yang ada. Jika saja masyarakat sekarang membutuhkan orang yang bisa membuat pelatihan digital dalam memajukan daerahnya, maka kader PMII harus sigap dan siap menjadi *volunteer* untuk membantunya. Hal

ini yang harus menjadi perhatian bagi kader-kader PMII, segala apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini harusnya menjadi hal yang mampu kader PMII lakukan.

PMII harus dikenal luas oleh masyarakat, dikenal kompeten oleh masyarakat. PMII harus jeli melihat peluang yang bisa menjadi nilai lebih di masyarakat. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan pengembangan *softskill* dan terutama *hardskill* yang harus dipunyai kader PMII untuk menunjang kompetensi mereka ketika menghadapi problem sosial yang ada di masyarakat.

Pemetaan kader PMII sesuai dengan bidangnya merupakan langkah konkrit dalam memanfaatkan SDM kader guna mengisi aspek sosial yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan organisasi. Selainnya adalah pendiasporaan dalam mengisi ruang-ruang strategis guna ajang unjuk gigi PMII dalam ruang sosial, namun perlu digaris bawahi bahwa hal ini

perlu pertimbangan yang matang yaitu masalah kesiapan dan kematangan ideologis kader.

C. PMII DAN KOPRI

Hubungan PMII dan KOPRI

Korps PMII Putri atau biasa disebut KOPRI adalah badan semi otonom yang strukturnya disesuaikan dengan hierarki struktur PMII. Salah satu alasan mengapa KOPRI didirikan ialah untuk menghapus diskriminasi kepada kaum perempuan. Dengan hadirnya KOPRI ini diharapkan terciptanya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga kemandirian seperti yang diharapkan oleh masyarakat terutama perempuan dapat terwujud. KOPRI juga merupakan bentuk dari strategi PMII mengenai pemberdayaan Perempuan sebab KOPRI bisa menjadi sebuah wadah untuk bernegosiasi bagi para individu-individu yang berada didalamnya, sehingga kesempatan-kesempatan tersebut didasarkan pada *partical needs* dan *strategi needs* dari individu-individu yang ada didalamnya.

KOPRI berkomitmen akan senantiasa menjadi organisasi yang peduli terhadap berbagai persoalan kemanusiaan dan senantiasa menjadi organisasi yang peduli terhadap berbagai persoalan kemanusiaan dan peradaban. Terutama terhadap kasus-kasus yang tidak menyenangkan yang terjadi pada perempuan. Maka dari itu, sebagai organisasi mahasiswa perempuan terbesar di Indonesia, konsep kaderisasi dalam KOPRI seharusnya tidak hanya untuk mencari kader sebanyak-banyaknya tetapi harus pula menjadi proses pembelajaran dan penempatan diri, etika, serta intelektualitas. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan kader yang berkualitas.

Kerjasama PMII dan Kopri

Sebagai organisasi keperempuanan terbesar di Indonesia, KOPRI sendiri sudah melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti : berkerja sama dengan KPAI, dengan yayasan ginjal Indonesia, Kominfo Jatim, dan masih banyak lagi. Tentunya kerjasama tersebut

bukanlah hanya sekedar formalitas saja, akan tetapi memiliki tujuan yang terstruktur guna menyalurkan impian kader KOPRI yaitu terciptanya lingkungan yang bebas dari deskriminasi gender.

Selain itu, KOPRI juga melakukan kerjasama dengan PMII, dan seperti yang kita ketahui bahwasanya KOPRI adalah badan semi otonom PMII . jadi, setiap gerakan dan keputusan harus selaras dengan PMII. Juga, hal tersebut termasuk bentuk kerjasama PMII dengan KOPRI yaitu pemberian wadah kepada KOPRI untuk terus berekspresi.

Adanya kontribusi PMII dalam penyebaran informasi KOPRI tentunya bertujuan untuk membantu agar informasi tersebut terjamah pada semua kalangan, baik laki-laki, perempuan, anak-anak atau lansia. Dengan semakin banyaknya yang berkontribusi dalam penyebaran informasi, maka, semakin banyak pula yang terjamah informasi tersebut. Lantas isu-isu apa saja yang selalu di perjuangkan oleh kader-kader KOPRI?

salah satunya adalah isu gender dan realitas sosial.

D. GENDER DAN DOMINASI PATRIARKI

Gender dan realitas sosial

Gender pada umumnya mempelajari sifat dan perilaku yang dianggap pantas bagi individu, bukan karena ia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Gender dipahami sebagai suatu sistem yang dibentuk oleh masyarakat untuk membuat klasifikasi sosial yang pembentukannya berdasarkan kepada pembagian jenis kelamin. Dalam masyarakat yang patrilineal dan androsentris, sejak awal beban gender anak laki-laki jauh lebih dominan jika dibandingkan dengan anak perempuan. Pengenalan atau pelebelan gender yang dilekatkan kepada jenis kelamin, seringkali membebani karena identifikasi gender lebih dari hanya sekedar pengenalan terhadap jenis kelamin, tetapi menyangkut nilai fundamental yang telah membudaya di dalam masyarakat.

Contoh dari identifikasi gender lebih dari pengenalan jenis kelamin, seperti yang bekerja dalam sektor publik adalah laki-laki sedangkan yang dalam sektor domestik adalah perempuan. Dalam pendidikan tingkat dasar pun hal tersebut sudah di tanamkan, misalnya terlihat ilustrasi kegiatan anak laki-laki dan anak perempuan seperti “budi membantu ayah di sawah, siti membantu ibu di dapur” konstruksi yang menyiratkan perempuan bekerja dalam ranah domestik, bukan hanya dipaparkan dalam ranah pendidikan. Perbedaan konstruksi jenis kelamin yang salah juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Urusan domestik seperti mendidik, dan merawat anak, membersihkan rumah, dikonstruksikan sebagai “kodrat perempuan”. Sedangkan laki-laki diidentikan dengan tugas mencari nafkah (bekerja). Padahal bukan hanya tugas perempuan mendidik anak, dan juga bukan hanya tugas laki-laki untuk bekerja. Pekerjaan tersebut dapat dipertukarkan, seperti laki-laki mendidik anak dan berada di rumah, dan perempuan diluar bekerja mencari nafkah.

Namun, dalam realita nya, apabila perempuan yang bekerja perempuan tersebut akan di cap tidak peduli dengan perkembangan anak. Begitu juga dengan laki-laki, bila ia hanya dirumah mengurus rumah, maka ia akan di cap sebagai benalu istri. Pandangan inilah yang mempengaruhi kontruksi gender yang salah, bahkan sampai sekarang pun pendapat ini masih sering berseliweran di dalam kegiatan bermasyarakat.

Teori sosial yang menjelaskan kontruksi sosial atas gender laki-laki dan perempuan serta perbedaan secara fisik dikenal dengan istilah Teori Nurture dan Teori Nature. Artinya ketika kita membahas teori nurture maka perbedaan yang lahir antara laki-laki dan perempuan adalah perbedaan yang dilahirkan oleh kontruksi sosial yang membuat laki-laki memiliki kedudukan yang lebih bebas dan lebih dominan daripada perempuan. Sedangkan Teori nature adalah teori secara biologis yang tidak bisa dirubah perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena secara kodrat penciptaan dan fisik jauh berbeda.

Kesetaraan dan keadilan gender

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti pembakuan/pelebelan, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Kesetaraan gender sendiri memiliki arti kesamaan kondisi, baik laki-laki maupun perempuan dalam mendapatkan akses terhadap sumberdaya pembangunan, kesamaan untuk memperoleh kesempatan, serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dalam kegiatan pembangunan, kesamaan dalam penguasaan terhadap sumber daya pembangunan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial dan budaya. Konsep ini merujuk pada situasi dimana tidak ada individu

yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut, atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka karena jenis kelaminnya.

Pada tahun 2000 Presiden RI, Abdurrahman Wahid, mengeluarkan Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan (inpres PUG). Harapannya pembangunan nasional akan mengintegrasikan perspektif gender sejak proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Untuk memperkuat payung hukum pengarusutamaan gender, maka tahun 2006 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyusun draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengarusutamaan Gender.

Pengarusutamaan merupakan sebuah proses yang dijalankan untuk menggiring aspek-aspek yang sebelumnya dianggap tidak penting atau bersifat marjinal kedalam putaran pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas utama

kelembagaan dan program kerja. Perngarusutamaan gender merupakan rangkaian startegi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, desain, dan pelaksanaan kebijakan.

Seperti yang kita lihat, bahwa pemerintah sendiri sudah melakukan banyak upaya untuk mewujudkan keadilan gender dan kesetaran gender tersebut. Akan tetapi, peran masyarakat juga sangat di butuhkan. Mau sebanyak apapun regulasi yang dibuat, namun dari masyarakat sendiri masih menanankan gagasan patriarki. Maka regulasi tersebut hanya seperti kacang tanpa isi nya. Seharusnya, peran masyarakat yang merupakan intrumen negara sebisa mungkin, menyuarakan keadilan gender tersebut. Karena, negara yang maju adalah negara yang mengkokohkan kesetaraan gender.

Kesetaraan gender sendiri tidak melulu dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya pertimbangan, mengingat bahwa

isu yang muncul mengenai isu kesetaraan gender diartikan menjadi segala sesuatu, baik itu hak maupun kewajiban, mutlak sama dengan laki-laki, maupun sebaliknya. Maka dari itu, perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan yang setiap butir tujuannya tidak lupa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sehingga perempuan mendapatkan kedudukan yang layak bukan karena rasa iba, tetapi kerja keras memberi pengaruh terhadap sekitar.

Gagasan patriarki dan feminisme

Dalam upaya menyuarakan keadilan gender dan kesetaraan gender, maka peran kita juga memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat tentang gagasan patriarki dan feminisme. Patriarki sendiri merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam masyarakat sedangkan feminisme merupakan suatu ideologi yang menyatakan

terdapat persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan.

Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai penguasa yang dominan sehingga menimbulkan dampak negatif yang berpengaruh terhadap ketidaksetaraan gender. Masyarakat dengan budaya patriarkis yang tinggi kerap kali memandang perempuan sebelah mata. Karena budaya patriarki juga banyak terjadi kekerasan karena perempuan selalu dianggap lemah lembut karena sikap feminimnya sedangkan laki-laki harus jantan dan kuat karena akar dari sikap maskulin yang menuntun sebagian laki-laki sering merasa merendahkan dan menganggap perempuan adalah objek merupakan tindakan yang wajar dan sah-sah saja karena masyarakat sosial pun menawarkan hal tersebut.

Seringkali perempuan dikaitkan dengan feminisme dan perjuangan patriarki. Nyatanya, perlawanan terhadap patriarki tidak hanya untuk menguntungkan perempuan saja, melainkan untuk laki-laki yang dihadapkan dengan segala

pemikiran bahwa laki-laki harus menjadi apa yang masyarakat inginkan. Seringkali kita mendengar bahwa laki-laki diharuskan tetap tegar dalam segala kondisi, tidak boleh menangis, manja dan lain sebagainya. Feminis ingin menghapus anggapan seperti itu, ingin agar laki-laki dapat menunjukkan bahwa ia sedang berada dalam posisi lemah dan sedang kecewa, dan feminis ingin menghapus standar ganda yang merugikan pihak tertentu.

Banyak yang beranggapan, seorang feminis pastilah membenci laki-laki, serta berupaya melemahkannya melalui dekonstruksi maskulinitas yang mereka lakukan. Atau stigma yang lebih parah lagi berkenaan dengan konsep religius, dimana feminis dicap sebagai kaum ateis dan anti keberadaan Tuhan. Sudah seharusnya stigma negatif yang merebak di masyarakat harus diluruskan. Feminis bukanlah orang-orang yang anti terhadap paham agama dan kepercayaan tertentu, karena semua agama dan kepercayaan sepakat untuk tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin. Adapun

mengenai anggapan bahwa feminis berupaya untuk melemahkan kekuatan laki-laki, tentu hal itu tidaklah benar. Kasus pelanggaran tak mengenal bias gender manapun, artinya baik laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi menjadi pelaku ataupun korban. Maka, sudah seharusnya masalah ketimpangan gender menjadi pekerjaan rumah bagi segenap kalangan.

Isu kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan juga telah diformalkan di Indonesia salah satunya pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 pasal 15, yang berbunyi “setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Akhirnya, selain dari sisi hukum, praktek mengenai cara membangun tradisi kehidupan yang tidak bias gender perlu digalakan. Tentu sebagai negara republik, perlu ditumbuhkan budaya demokratis dalam segala aspek guna terjaminnya keharmonisan diantara sesama. Dengan begitu pikiran dan perbuatan patriarkis dapat perlahan dihilangkan.

E. PMII, NU, dan ASWAJA

Historis

PMII sebagai organisasi yang terlahir dari rahim NU bukan hanya semata keterkaitan hubungan struktural saja. PMII terlahir atas realitas kultural historis yang ada pada organisasi NU pada saat itu. Realitas sosial yang ada pada masa itu mendorong NU untuk berbenah secara pengkaderan untuk melahirkan kader loyal ideologis organisasi.

NU yang secara nilai berdasarkan tradisionalis islam menjadikan kader-kader mudanya menginginkan ruang baru untuk berpikir dalam konteks politik kenegaraan. Atas dasar itu PMII berdiri, berhaluan Aswaja yaitu nilai yang sama digunakan oleh NU dalam pengajarannya sebagai nilai pengkaderan.

Selama perjalanannya walaupun banyak retorika dan dinamika proses tumbuh kembang PMII terutama terkait hubungan strukturalnya dengan NU tetap menjadikan PMII sebagai

organisasi yang berdasar atas islam *ahlussunah wal jama'ah*.

Mengapa Aswaja?

Pertanyaan ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik untuk di bahas dan di jadikan refleksi diri kita , maupun sebagai orang yang memandang dari luar PMII. Mengapa PMII memilih aswaja diantara banyaknya nilai ideologi yang ada di Indonesia?. PMII bukanlah organisasi tunggal yang berdiri atas egosentris individual semata, PMII berdiri atas restu berbagai orang dan terutama NU sebagai orangtua dari PMII

Realitas historis kelahiran PMII yang berhubungan kental dengan NU memberikan nilai dan corak sendiri bagi PMII dalam mewarnai organisasinya. Aswaja bukanlah nilai primordial yang hanya bisa dimiliki satu kelompok tertentu saja. Atas dasar kesadaran berbangsa dan bernegara dan kesadaran kultural historis PMII dengan NU menjadikan PMII sendiri memilih Aswaja sebagai haluan

organisasi. Nilai fundamental yang dijadikan rujukan dalam sistem pengkaderan dan nilai pengajaran dalam membenahi bobroknya negara dan bangsa.

Nilai-nilai aswaja merupakan hasil kristalisasi dari ajaran Nabi Muhammad sebagai pemimpin nomor satu Islam dan seorang revusioner sebagai pembebas ketidakadilan. Nilai ini dipandang ideal dalam menciptakan ruang sosial yang moderat dan mampu menjamah berbagai lapisan masyarakat dari bawah hingga atas. Melalui Aswaja harusnya PMII mampu melahirkan SDM kader sebagai perantara dalam mengajarkan masyarakat akan kesehjahteraan, keamanan, dan membangun kontruksi sosial masyarakat atas dasar keadilan.

PMII sekarang

. Meminjam istilah Kyai Ahmad Baso, “PMII hari ini itu jadi organisasi yang hidup segan mati tak mau, sudah hijrah dari tradisi intelektual baca-tulis ke tradisi poster ucapan selamat dan video ucapan selamat. Akhirnya anak-anak muda

NU yg punya minat lebih pada gairah keilmuan memilih menempuh jalan sunyi sendirian mengulik buku dan secara berkala menulis esai di koran ternama, begitu pula anak muda NU yg punya kepedulian atas ketimpangan sosial-ekonomi dan eksploitasi lingkungan hidup mereka akan memilih jalan terasing dengan masuk di NGO-NGO juga organ taktis pengorganisasian. Karena keduanya hari ini tak lagi dapat ditampung oleh PMII”

Tradisi intelektual NU yang dahulu selalu mengedepankan keilmuan dan pengajaran nilai organisasi rupanya kurang terhidupi oleh kader-kader PMII sekarang. Ya, memang jelas begitulah realitanya tradisi Intelektual yang berlandaskan ideologi dan keilmuan berubah menjadi tradisi taktis perolehan posisi dalam lini-lini strategis pemerintahan.

Pengkaderan PMII seharusnya berdasar nilai bukan hanya realitas historis dan sosial sekarang. Jika kita hanya mengikuti perkembangan tanpa ada penguatan nilai ideologisasi yang matang pun

akan sia-sia adanya pendiasporaan dan pemetaan kader ke lini-lini strategis masyarakat sosial.

PMII seharusnya berisikan orang-orang idealis yang mampu mengawal keberlasungan hidup berbangsa dan bernegara berdasar nilai Aswaja sebagai nilai fundamental organisasi. PMII seharusnya merepresentasikan islam *ahlussunah wal jama'ah* sebagai nilai pengajaran dalam mengkader, dan PMII seharusnya menghidupkan budaya intelektual berdasar historis kebangsaan untuk membangun peradaban yang berkemajuan.

